

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERENCANA
DI DESA BODDIE KECAMATAN MANDALLE KABUPATEN PANGKEP**



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERENCANA
DI DESA BODDIE KECAMATAN MANDALLE KABUPATEN PANGKEP**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan Memperoleh Gelar

Sarjana Sosial (S. Sos)



Disusun dan Diajukan Oleh:

RACHMAWATI

Nomor Induk Mahasiswa : 10561 11072 17

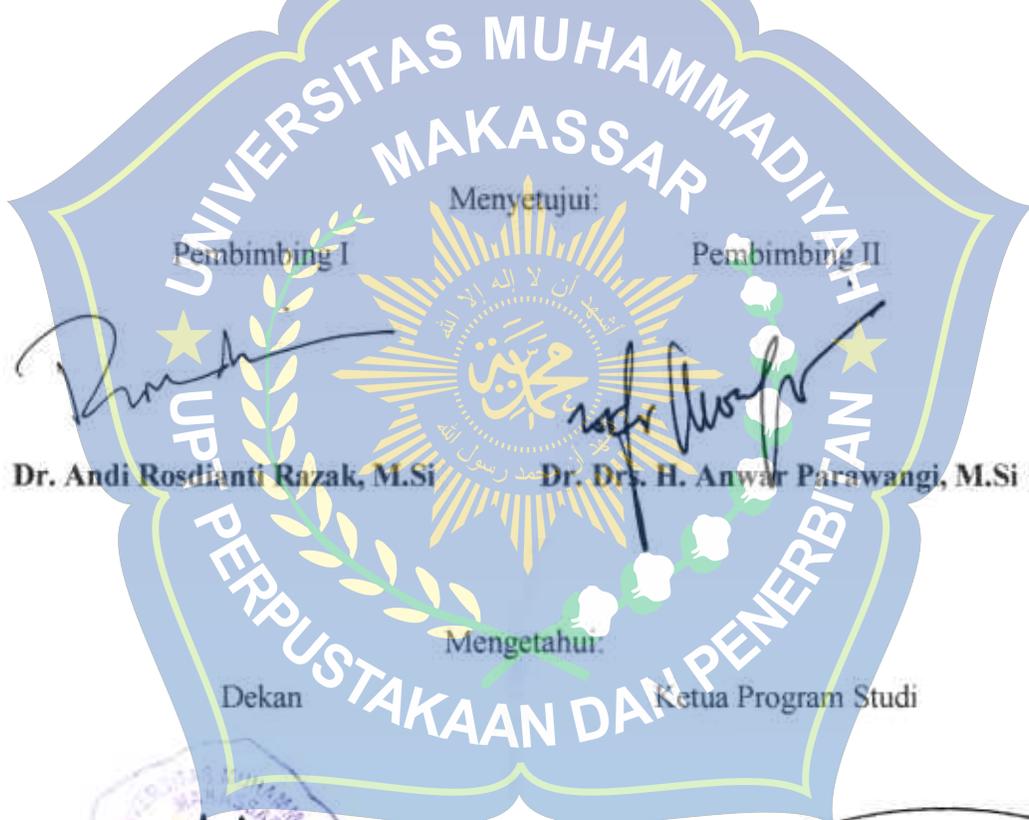
Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN AKHIR

Judul Skripsi : Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana di Desa Boddie Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep
Nama Mahasiswa : Rachmawati
Nomor Induk Mahasiwa : 10561 11072 17
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara




Dr. Andi Rosdianti Razak, M.Si


Dr. Drs. H. Anwar Parawangi, M.Si


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM: 730727


Nasrul Haq, S.Sos., MPA
NBM: 1067463

HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor 0205/FSP/A.4-II/VIII/42/2021 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang dilaksanakan di Makassar pada hari Senin tanggal 30 bulan Agustus tahun 2021



TIM PENILAI

Ketua Sekretaris

Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si NBM: 730727
Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si NBM: 1084366

PENGUJI:

1. Dr. Hj. Budi Setiawati, M.Si (*Budi Setiawati*)
2. Dr. Muhammad Tahir, M.Si (*Muhammad Tahir*)
3. Dr. Jaelan Usman, M.Si (*Jaelan Usman*)
4. Dr. Drs. H. Anwar Parawangi, M.Si (*Anwar Parawangi*)

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Rachmawati

Nomor Induk Mahasiswa : 10561 11072 17

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 03 September 2021

Yang Menyatakan,


Rachmawati



ABSTRAK

Rachmawati, Andi Rosdianti dan Anwar Parawangi. 2021. Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana di Kabupaten Pangkep Kecamatan Mandalle Desa Boddie.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan dari kebijakan implementasi Program Kampung Keluarga Berencana di Desa Boddie Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi, wawancara dan dokumentasi terhadap sejumlah informan. Informan dalam penelitian ini terdiri dari 5 (lima) orang yang dianggap dapat memberikan informasi terkait Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana di Kampung Lamasa Desa Boddie.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Program kampung Keluarga Berencana di Desa Boddie Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep secara umum sudah berjalan baik. Dalam melakukan Analisa mempunyai empat indikator yaitu: (1) komunikasi dapat dilihat dari penyampaian informasi serta kejelasan informasi. Dalam sosialisasi sudah dilakukan dengan baik dan sudah sesuai dengan harapan karena kelompok sasaran sudah memahami apa yang disampaikan implementor. (2) Sumber daya terdapat tiga sub yaitu sumber daya manusia, sumber daya fasilitas dan sumber anggaran. Dalam pelaksanaan program kampung KB di Desa Boddie belum dapat dikatakan optimal karena sumber daya manusia dan sumber daya anggaran masih belum bisa menunjang keberhasilan program kampung KB, sedangkan sumber daya fasilitas sudah dapat membantu untuk memfasilitasi pengimplementasian. (3) Disposisi sikap pelaksana dari implementor sudah cukup optimal karena sudah dapat memberikan informasi secara ke masyarakat. (4) Struktur birokrasi Dalam pelaksanaan program tersebut tidak terlepas dengan struktur yang telah diberikan tugas dalam menjalankan kegiatan tersebut.

Kata-kata Kunci: Implementasi, Program Kampung Keluarga Berencana.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh

Dengan mengucapkan Alhamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya lah penulis dapat menyusun skripsi yang berjudul **"Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana di Desa Boddie Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep"**. Shalawat serta salam tak lupa pula penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad Shollallahu Alaihi Wasallam. Beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah membawa umatnya dari alam yang gelap gulita menuju ke alam yang terang menerang seperti saat ini.

Penyusunan skripsi ini diajukan sebagai syarat menyelesaikan pendidikan gelar S1 Ilmu Administrasi Negara di Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis menyadari tanpa bantuan dan arahan dari berbagai pihak. Skripsi ini tidak dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan yang telah diberikan Kepada orang tuaku tercinta yaitu Bapak saya **Makmur Dollah** dan Ibu saya **Hj. St. Suarni, S.Pd** atas segala pengorbanan, kesabaran, doa dan kasih sayangnya dalam membesarkan dan mendidik penulis, tanpa pernah mengeluh serta selalu memberikan kekuatan serta semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Untuk itu rasa terima kasih yang tidak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Ibu Dr. Andi Rosdianti, M.Si selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Drs. H. Anwar Parawangi, M.Si selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

2. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, Terimakasih atas kesempatan yang telah diberikan penulis untuk bisa menempuh Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar,
3. Ibunda Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
4. Bapak Nasrul Haq, S.Sos., MPA selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara, dan segenap dosen serta jajaran Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan banyak pengetahuan dari awal hingga semester akhir.
5. Bapak Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si selaku Penasehat Akademik Penulis di jurusan Ilmu Administrasi Negara.
6. Ayahanda Dr. H. Samsir Rahim, S.Sos., M.Si dan Istri selaku orang tua saya di Makassar yang selalu memberikan dorongan-dorongan positif serta motivasi dan semangat dalam mengerjakan tugas akhir ini.
7. Pihak Kepala PLKB Kecamatan Mandalle serta PKB Desa Boddie dan Kepala PPKBD Desa Boddie yang telah membantu serta memberikan izin untuk melakukan penelitian di Kampung Lamasa Desa Boddie.
8. Pihak Dinas Penanaman Modal Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang telah memberikan izin penelitian di Kabupaten Pangkep Kecamatan Mandalle Desa Boddie.
9. Masyarakat yang sudah membantu saya dalam menyelesaikan penelitian ini.
10. Terima kasih kepada saudara serta sepupu saya yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
11. Kepada kakanda Ahmad Afif yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

12. Terima kasih juga kepada teman-teman seperjuangan kelas saya Ilmu Administrasi Negara kelas B 017 terkhusus kepada Rezky Wijaya, Dewi Ulandari, Riska Febrianti, Nurul Lathifah, Willi Ariyanti, Miftahul Haerat dan Eka Febriani.
13. Terima kasih kepada teman-teman KKP posko Disperindag saya yaitu Fitri Putri Pangestu, Sitti Rahma dan Andi Rahmat Nizar Hidayat.
14. Terima kasih semua pihak yang telah membantu dan mendukung saya dalam penyusunan skripsi.
15. Last but not least, saya ingin berterima kasih untuk diri sendiri, terima kasih telah berjuang, bekerja keras dan sabar melewati suka duka, serta tetap melakukan yang terbaik dan tidak pernah menyerah.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, maka dari itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua pembaca.

Wassalamuualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 05 September 2021

Yang menyatakan,


Rachmawati

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN AKHIR.....	ii
HALAMAN PENERIMAAN TIM.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Kebijakan Publik.....	13
1. Pengertian Kebijakan Publik.....	13
2. Tahap-Tahap dalam Proses Pembuatan Kebijakan.....	15
C. Konsep Implementasi Kebijakan.....	17
a. Pengertian Implementasi Kebijakan.....	18
b. Model Implementasi Kebijakan Publik.....	19
D. Konsep Program Kampung Keluarga Berencana.....	30
E. Kerangka Pikir.....	36
F. Fokus Penelitian.....	37
G. Deskripsi Fokus.....	37

BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	40
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	40
C. Sumber Data.....	41
D. Informan Penelitian.....	42
E. Teknik Pengumpulan Data.....	42
F. Teknik Analisis Data.....	43
G. Teknik Pengabsahan Data.....	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
a. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	47
1. Gambaran Umum Kabupaten Pangkep.....	47
2. Gambaran Umum Kecamatan Mandalle.....	49
3. Gambaran khusus lokasi konsentrasi penelitian.....	50
4. Struktur Organisasi Kampung KB Desa Boddie.....	53
B. Hasil Penelitian.....	53
C. Pembahasan.....	69
BAB V PENUTUP	76
A. Simpulan.....	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	81

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan perbedaan terkait Penelitian Terdahulu	12
Tabel 3.1 Informan penelitian.....	42
Tabel 4.1 Wilayah Kabupaten Pangkep.....	48
Tabel 4.2 Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Pangkep Tahun 2020	49
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Desa Boddie Tahun 2020	50
Tabel 4.4 Program kerja Kampung KB Desa Boddie.....	57



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Implementasi Menurut Edwards III : 1980.....	23
Gambar 2.2 Variabel-variabel Proses Implementasi Menurut Mazmanian & Paul S. Sabatier, (1983:22)	28
Gambar 2.3 Implementasi sebagai proses Politik dan Administrasi menurut Marille S. Grindle (1980).....	29
Gambar 2.4 Kerangka Pikir	37
Gambar 4.1 Peta Wilayah Kabupaten Pangkep	47
Gambar 4.2 Peta Desa Boddie	51
Gambar 4.3 Struktur Organisasi Pengurus Kampung KB Desa Boddie.....	53
Gambar 4.4 Struktur Organisasi Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD).....	74



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan yang paling mendasar bagi negara berkembang, khususnya di Indonesia adalah jumlah penduduk yang sangat besar. Hal ini diketahui dari hasil sensus penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya. Penduduk Indonesia, sebagaimana sering dikemukakan, menempati urutan ke-4 di dunia dengan jumlah penduduk terbanyak pada September 2020 tercatat 270,20 juta jiwa (Badan Pusat Statistik, 2021).

Berdasarkan liputan kompas.com, masalah kependudukan merupakan salah satu masalah yang paling serius. Bahkan di negara berkembang seperti Indonesia, masalah ini sangat mendesak. Karena pertumbuhan penduduk yang cepat menghambat pertumbuhan ekonomi dan sosial. Jika masalah tidak dapat diselesaikan secepat mungkin, situasinya akan menjadi lebih buruk dari waktu ke waktu.

Lajunya pertumbuhan penduduk Indonesia berdampak pada program KB pada masyarakat. Hal itu terjadi diakibatkan kurangnya sosialisasi dari aparat pemerintah maka dari itu masyarakat kurang memahami apa itu program KB dan kurangnya kesadaran serta peran masyarakat pentingnya program KB di masyarakat, dan berkurangnya penggunaan alat kontrasepsi untuk keluarga yang telah menikah. Saat ini di Indonesia masih banyak masyarakat menengah kebawah apalagi di daerah pedesaan memilih untuk menikah muda

dan keinginannya untuk menambah anggota keluarga lebih dari dua anak walaupun pemerintah sudah mencanangkan dua anak lebih baik dari slogan BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebagai dasar pelaksanaan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana ditegaskan bahwa Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tidak hanya membahas pada masalah Pembangunan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, tetapi juga masalah Pengendalian Kependudukan terkait arah kebijakan pembangunan nasional pemerintah pada tahun 2015-2019 serta BKKBN telah diberi mandat demi kesuksesan Agenda Pembangunan Nasional (Nawacita), terkhusus Agenda Prioritas ke-3 "Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-daerah dan Desa dalam rangka Negara Kesatuan", Agenda Prioritas ke-5 tentang "Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia", dan Agenda Prioritas ke-8 yaitu "Revolusi Karakter Bangsa" dengan melalui Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana. Dari sebuah Pesan Presiden RI terhadap BKKBN untuk dapat Menyusun suatu program guna memperkuat upaya pencapaian target suatu Pembangunan di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dapat dapat memberikan manfaat terhadap masyarakat Indonesia di berbagai tingkatan wilayah yang ada (Sumber: BKKBN, 2019).

Saat ini laju pertumbuhan penduduk perlu diutamakan karena demi optimalisasi perekonomian, khususnya di Indonesia. Salah satu bentuk

program yang dilakukan pemerintah bekerjasama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri kesehatan. BKKBN telah melimpahkan tugas dan tanggung jawab kepada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang ada di daerah untuk melaksanakan program yang telah dicanangkan yaitu Program Kampung Keluarga Berencana atau Kampung KB yang telah dilaksanakan di seluruh Indonesia (Lettiyan et al., 2020).

Keluarga Berencana (KB) merupakan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat melalui kematangan pernikahan, pengendalian kelahiran, mendukung ketahanan keluarga dan meningkatkan kesejahteraan keluarga serta menciptakan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera (Sumber: Amalini, 2019).

Program Kampung KB memiliki implikasi strategis jangka Panjang. Program ini merupakan program pemberdayaan masyarakat berbasis keluarga dan komunitas. Pemberdayaan sebagai strategi efektif yang dapat menyelesaikan masalah ledakan penduduk berdasarkan partisipasi masyarakat. Itu sama dengan prinsip dari masyarakat, untuk masyarakat dan oleh masyarakat (Sumber: Aji & Yudianto P, 2020).

Kampung Keluarga Berencana atau Kampung KB merupakan salah satu program Presiden Jokowi yang telah diterapkan di Indonesia, salah satunya sudah ada di Provinsi Sulawesi Selatan sejak tahun 2016. Sejak tahun 2016 hingga tahun 2020, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sudah memiliki

beberapa titik di kawasan Kampung KB. Program KB juga tidak lagi hanya fokus dalam upaya pengendalian jumlah penduduk saja, namun juga bagaimana melalui program KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga) guna meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat sehingga KB masih dibutuhkan untuk memenangkan persaingan global. Kampung KB sendiri dikelola dan diselenggarakan dari, oleh serta untuk masyarakat dimana dengan memperdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat agar dapat memperoleh pelayanan program KB yang baik, demi mewujudkan keluarga yang berkualitas dan sejahtera.

Penelitian ini bukanlah menjadi satu-satunya yang sudah dilakukan, akan tetapi sebelumnya pun sudah yang mengkaji terkait implementasi kebijakan program kampung KB. Adapun salah satunya yaitu dari jurnal Rahman & Indrawadi, (2019) Implementasi Program Kampung KB dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Gunung Pangilon Kecamatan Padang Utara Kota Padang. Dalam jurnal tersebut membahas tentang implementasi program Kampung KB, namun yang membedakan yaitu lebih memfokuskan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam jurnal tersebut juga menjelaskan program dari kampung KB, namun terdapat beberapa kendala dalam proses implementasinya salah satunya belum dibentuknya pengelola yang menjalankan program-program tersebut.

Pemerintah Kabupaten Pangkep telah melaksanakan program kampung Keluarga Berencana (KB) di beberapa titik kampung yang ada di Kabupaten Pangkep. Salah satunya di Kampung Lamasa Desa Boddie Kecamatan

Mandalle Kabupaten Pangkep. Dengan adanya program tersebut dapat mewujudkan masyarakat memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dalam pengendalian angka kelahiran serta terkendalinya pertumbuhan penduduk (Sumber: Infopublik.id, 2020).

Kecamatan Mandalle terdiri dari 6 desa, salah satu desa terpadat yang ada di Kecamatan Mandalle adalah desa Boddie. Berdasarkan hasil pemutakhiran data keluarga tahun 2019 bahwa jumlah penduduk desa Boddie tercatat sebanyak 2.591 jiwa yang terdiri dari 1.290 jiwa laki-laki dan 1.307 jiwa perempuan. Disisi lain jumlah kepala keluarga 765 KK yang jika dirinci berdasarkan tingkat kesejahterannya adalah: Pra Sejahtera 8 KK, Keluarga Sejahtera 350 KK, Keluarga Sejahtera II 250 KK, serta Keluarga Sejahtera III 137 KK dan KK Plus sebanyak 20 KK. Selanjutnya dalam bidang Keluarga Berencana dapat kami sampaikan bahwa jumlah peserta KB Aktif desa Boddie sampai dengan Desember 2019 tercatat sebanyak 331 (85,88%) dari total Pasangan Usia Subur (PUS) sebanyak 402, dengan kualitas penggunaan kontrasepsi masih didominasi oleh penggunaan kontrasepsi suntik, penggunaan kontrasepsi jangka Panjang hanya 19% dari total peserta KB aktif 331.

Dari data yang didapat terkhususnya di kampung Lamasa, dimana pelaksanaan program kampung KB sudah terlaksana yang berdasarkan data pemakai akseptor dari tahun 2018 sampai 2020 mengalami perubahan yang tidak signifikan contohnya pada pemakai akseptor yang terkhusus di suntik pada tahun 2018 berjumlah 26 orang sedangkan pada tahun 2019 mengalami

peningkatan sebanyak 28 orang akan tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan hanya 25 orang.

Dari latar belakang penelitian yang ada, untuk mengetahui sejauh mana program kampung KB ini berjalan di kampung Lamasa, Desa Boddie, Kec. Mandalle, Kab. Pangkep. Sehingga Penulis mengambil judul "**Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana Di Desa Boddie Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah komunikasi dalam Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (KB) Di Desa Boddie Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep?
2. Bagaimanakah Sumber Daya dalam Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (KB) Di Desa Boddie Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep?
3. Bagaimanakah Disposisi dalam Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (KB) Di Desa Boddie Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep?
4. Bagaimanakah Struktur Birokrasi dalam Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (KB) Di Desa Boddie Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari rumusan masalah tersebut maka dapat diuraikan tujuan dari penelitian yang dapat dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui Komunikasi dalam implementasi program kampung keluarga berencana di Desa Boddie Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep.
2. Untuk mengetahui Sumber Daya dalam implementasi program kampung keluarga berencana di Desa Boddie Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep.
3. Untuk mengetahui Disposisi dalam implementasi program kampung keluarga berencana di Desa Boddie Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep.
4. Untuk mengetahui Struktur Birokrasi dalam implementasi program kampung keluarga berencana di Desa Boddie Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep.

D. Manfaat Penelitian

Melakukan penelitian ini tentunya akan memberikan manfaat kepada berbagai pihak baik secara langsung ataupun tidak langsung. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu:

1. Secara Teoritis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat melengkapi dan menambah data ilmiah serta mampu menjelaskan Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana di Desa Boddie, Kecamatan

Mandalle, Kabupaten Pangkep. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Ilmu Administrasi Negara.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan, informasi, saran dan masukan bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kampung Lamasa, Desa Boddie, Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkep.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi landasan dalam penyusunan Skripsi yang berjudul Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana Di Desa Boddie Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep adalah sebagai berikut:

1. Dalam jurnal Rahman HM & Junaidi Indrawadi (2019) Implementasi Program Kampung KB dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Gunung Pangilun Kecamatan Padang Utara Kota Padang. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi program Kampung KB serta kendala dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kampung KB Berok. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini yaitu implementasi program Kampung KB Berok bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dimana adapun program yang dilakukan yaitu Program Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK Remaja). Metode yang dilakukan yaitu berupa penyuluhan, layanan Kesehatan serta pelatihan keterampilan.

Dalam penelitian ini masih terdapat kendala-kendala terhadap implementasi program seperti belum maksimalnya dukungan dari pemerintah, keterbatasan anggaran, belum terbentuknya pengelola yang aktif untuk menjalankan program tersebut, serta keterbatasan pengetahuan SDM (kader). Harapan dari penulis terhadap pemerintah dapat mengevaluasi kebijakan tersebut sehingga penerapannya dapat ditingkatkan agar kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

2. Dalam jurnal Lia Muliawaty (2019) Strategi Implementasi Kebijakan Tentang Program Kampung Keluarga Berencana Menuju Keluarga Sejahtera Di Kabupaten Cirebon. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan melakukan analisis secara mendalam serta melakukan analisa data yang berhubungan dengan implementasi kebijakan tentang program Kampung Keluarga Berencana di Kabupaten Cirebon dalam pengendalian kelahiran untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif analisis. Data dikumpulkan dari hasil penelitian, wawancara, observasi dan FGD.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan, implementasi kebijakan tentang program Kampung KB menuju keluarga sejahtera kabupaten Cirebon belum tercapai. Faktor-faktor yang menyebabkan pelaksanaan kebijakan program Kampung KB belum terealisasi karena faktor dari isi kebijakan itu sendiri yang menyebabkan kurangnya upaya pengelolaan lingkungan dan rutilahu, kegiatan bina keluarga belum optimal, kurangnya evaluasi

dan pelaporan Program KB itu sendiri, pengurus/penyuluh KB belum memadai, dan partisipasi masyarakat belum optimal.

Adapun strategi yang dilakukan apabila implementasi kebijakan tentang program Kampung KB itu dapat terlaksana dengan maksimal yaitu menggunakan strategi *Deversifikasi konsentris* yaitu tindakan untuk membuat sesuatu lebih beragam, tidak berfokus hanya satu program saja. Dimana dalam strategi tersebut menggunakan Kekuatan (Strengths) untuk menghadapi ancaman (Threat) yaitu dengan cara mengoptimalkan kemampuan dan keterampilan melalui mekanisme program secara utuh, pengadaan sarana pendukung yang memadai, mengoptimalkan kegiatan bina keluarga, serta menumbuhkan partisipasi masyarakat agar tertarik untuk mengikuti program Kampung KB demi peningkatan Kesehatan lingkungan.

3. Dalam jurnal Nila Anggraeni, Afifuddin dan Suyeno (2020) Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat (Studi Kasus Desa Sumberkarang Kabupaten Mojokerto). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berencana (KB) dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengidentifikasi faktor-faktor penghambat terlaksananya program kampung keluarga berencana dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa Sumberkarang Kabupaten Mojokerto. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian tersebut mendapat kesimpulan bahwa implementasi program kampung KB Desa Sumberkarang sudah berjalan baik dengan menerapkan SOP serta adanya pelatihan untuk para anggota kampung. Adapaun faktor pendukungnya yaitu adanya dukungan dari pemerintah, sarana dan prasarana juga memadai. Faktor penghambatnya yaitu kurangnya partisipasi dari masyarakat.

Dalam menjelaskan faktor persamaan dan perbedaan dalam penelitian terdahulu yang relevan, maka dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 2.1
Persamaan dan perbedaan terkait Penelitian Terdahulu

No	Nama/Tahun/Judul Penelitian	Faktor Persamaan	Faktor Perbedaan
1.	HM & Indrawadi, (2019) : Implementasi Program Kampung KB dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Gunung Pangilun Kecamatan Padang Utara Kota Padang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian yang mengenai implementasi Program KB. 2. Jenis penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian ini memfokuskan peningkatan kesejahteraan masyarakat 2. Lokasi penelitian yang dilakukan di Kelurahan Gunung Pangilun Kecamatan Padang Utara Kota Padang
2.	Muliawaty, (2019) : Strategi Implementasi Kebijakan Tentang Program Kampung Keluarga Berencana Menuju Keluarga Sejahtera Di Kabupaten Cirebon.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian yang terkait dengan implementasi kebijakan program kampung keluarga berencana 2. Jenis penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis pendekatan kualitatif menggunakan studi kasus 2. Penelitian ini memfokuskan pada strategi kebijakan 3. Teknik pengumpulan data salah satunya

			<p>menggunakan Focus Grup Discussion (FGD)</p> <p>4. Lokasi penelitian yang dilakukan di Kabupaten Cirebon</p>
3.	<p>Anggraeni et al., (2020): Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat (Studi Kasus Desa Sumberkarang Kabupaten Mojokerto)</p>	<p>1. Penelitian yang mengenai implementasi program kampung keluarga berencana</p> <p>2. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi</p>	<p>1. Tujuan penelitian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat</p> <p>2. Jenis pendekatan kualitatif menggunakan studi kasus</p> <p>3. Lokasi penelitian yang dilakukan di Desa Sumberkarang Kabupaten Mojokerto</p>

B. Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Chandler dan Plano (dalam Pasolong, 2013:38), kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Menurut Thomas R. Dye (dalam Pasolong, 2013:39) Kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (Sumber: Liana & Santoso, 2010 hlm 7).

Kebijakan Publik (Public Policies) merupakan rangkaian pilihan yang kurang lebih saling berhubungan, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah,

diformulasikan di dalam bidang-bidang isu sejak pertahanan energi, dan Kesehatan sampai kependidikan, kesejahteraan, dan kejahatan. Pada salah satu bidang isu tersebut terdapat banyak isu kebijakan, yaitu serangkaian arah tindakan pemerintah yang actual ataupun yang potensial yang mengandung konflik diantara segmen-segmen yang ada dalam masyarakat (Sumber: Dunn, 2012, hlm 109).

Kebijakan publik adalah rangkaian keputusan yang memiliki konsekuensi moral yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan dan terkait dengan tanah air ataupun tempat dimana yang bersangkutan berada. Dalam hal ini, kita dapat mempertimbangkan perilaku aparatur sebagai penyelenggara, serta interaksi antara aparat dengan masyarakat. Oleh karena itu, tanggung jawab dari seorang administrator publik meliputi tanggung jawab birokrasi, hukum, professional, politik dan agama.

Anderson (1978:3) mengemukakan bahwa kebijakan publik yaitu kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan serta pejabat-pejabat pemerintah dimana mempunyai tujuan penting dari sebuah kebijakan yang bermaksud untuk : “memelihara ketertiban umum (negara sebagai stabilisator); melancarkan perkembangan masyarakat diberbagai hal; menyesuaikan berbagai aktivitas; dan memperuntukan dan membagi berbagai materi” (Sumber: Tachjan, 2006:16).

2. Tahap-Tahap dalam Proses Pembuatan Kebijakan

Proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas *intelektual* yang dilakukan di dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat *politis*. Analisis kebijakan dilakukan untuk menciptakan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan dalam satu atau lebih tahap proses pembuatan kebijakan. Adapun tahap-tahap kebijakan yang dikemukakan oleh William N. Dunn sebagai berikut (Dunn, 2012:22-29).

1) Tahap Penyusunan Agenda (Perumusan Masalah)

Dalam tahap ini, perumusan masalah dapat membantu menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiagnosis penyebabnya, memetakan tujuan-tujuan yang memungkinkan, serta merancang peluang kebijakan yang baru. Dalam perumusan ini, para pejabat yang telah dipilih menempatkan masalah pada agenda publik. Dalam hal ini banyak masalah yang berkompetisi untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Adapun masalah yang masuk ke perumusan kebijakan dan adapula tidak disentuh sama sekali serta ditunda untuk waktu yang akan datang.

2) Tahap Formulasi Kebijakan (Peramalan)

Masalah yang masuk pada tahap ini kemudian dibahas oleh pembuat kebijakan dengan merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah. Pada tahap ini dapat menguji masa depan yang potensial, secara normative bernilai, menduga akibat dari kebijakan

yang ada atau yang diusulkan, serta mengenali kendala-kendala yang akan terjadi dalam pencapaian tujuan. Dalam tahap perumusan kebijakan masing masing alternatif yang ada bersaing untuk mendapat pemecahan masalah yang terbaik.

3) Tahap Adopsi Kebijakan (Rekomendasi)

Pada tahap ini, salah satu alternatif kebijakan yang dipilih diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, consensus di antara direktur Lembaga atau keputusan peradilan. Tahap adopsi kebijakan dapat membantu memperkirakan tingkat resiko dan ketidakpastian dan menentukan pertanggungjawaban administratif bagi implementasi kebijakan.

4) Tahap Implementasi Kebijakan (Pemantauan)

Setelah terpilih nya suatu alternatif kebijakan seperti dengan adanya program kebijakan yang dipilih maka harus diimplementasikan dan dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan sumber daya manusia. Tahap ini dapat membantu menilai tingkat kepatuhan, menemukan akibat-akibat yang tidak diinginkan dari kebijakan dan program, mengidentifikasi hambatan dan rintangan dalam implementasi, dan menemukan para pelaksana yang bertanggung jawab pada setiap tahap kebijakan. Dalam implementasi kebijakan yang diterapkan ada yang mendapat dukungan dari pelaksana, namun beberapa akan ditentang.

5) Tahap Penilai Kebijakan (Penilaian)

Tahap ini kebijakan yang diterapkan akan dilakukan pemeriksaan untuk menentukan apakah badan-badan eksekutif, legislatif dan peradilan memenuhi persyaratan undang-undang dalam pembuatan kebijakan dan pencapaian tujuan serta dapat memecahkan masalah dan memperbaiki yang dihadapi oleh masyarakat.

C. Konsep Implementasi Kebijakan

Hal terpenting dalam kebijakan negara adalah implementasi kebijakan negara. Jika suatu kebijakan telah diputuskan, maka kebijakan tersebut tidak akan berhasil dan akan terwujud jika tidak dilaksanakan. Usaha untuk melaksanakan kebijakan tentunya membutuhkan keahlian dan keterampilan dalam menguasai persoalan yang hendak dikerjakan, sehingga dalam hal ini kedudukan birokrasi menjadi strategis. Birokrasi yang berkewajiban melaksanakan kewajiban tersebut, sehingga birokrat dituntut memiliki keterampilan dan keahlian yang tinggi (Subianto, 2020:16).

Implementasi atau pelaksanaan kebijakan publik adalah rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan. Tanpa implementasi, suatu kebijakan yang telah dirumuskan akan sia-sia saja. Oleh karena itu, implementasi kebijakan mempunyai kedudukan yang penting di dalam kebijakan publik.

a. Pengertian Implementasi Kebijakan

Dengan mengutip Grindle (1980, Solichin Abdul Wahab (2002:59) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran-penjabaran keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin melalui saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, implementasi kebijakan menyangkut masalah konflik, keputusan dan menyangkut siapa memperoleh apa dari suatu kebijakan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses kebijakan bahkan mungkin jauh lebih penting daripada perumusan kebijakan. (Sumber: Abdoellah & Rusfiana, 2016, hlm 57).

Ripley dan Franklin dalam Winarno (2016:134) Implementasi adalah apa yang terjadi dalam undang-undang di tetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (Sumber: Masriani, 2017).

Menurut P. Sabatier & Mazmanian, (1980) dalam buku Subianto, (2020:17) Implementasi Kebijakan adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan, yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi sesudah proses pengesahan kebijakan negara, baik itu menyangkut usaha-usaha mengadministrasikan maupun usaha-usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat maupun peristiwa-peristiwa.

Van Meter dan Van Horn (1975) dalam buku Hamdi, (2014:18) mengatakan implementasi merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat, pemerintah, atau kelompok swasta untuk mencapai tujuan yang dituangkan dalam keputusan kebijakan.

Implementasi kebijakan publik adalah proses suatu kegiatan administrative yang dilakukan setelah kebijakan tersebut disetujui. Kegiatan ini berada di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mengandung logika *top-down*, yang dimaksudkan untuk menurunkan/menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro serta menjadi alternatif yang bersifat konkrit atau mikro. Sedangkan formulasi kebijakan dengan *bottom-up*, dimaksudkan yaitu proses yang diawali dengan pemetaan kebutuhan publik atau pengakomodasian tuntutan lingkungan kemudian diikuti dengan pencarian dan pemilihan alternatif bagaimana cara memecahkannya, lalu diusulkan untuk ditetapkan (Sumber: Tachjan, 2006:25).

b. Model Implementasi Kebijakan Publik

1. Model Implementasi menurut Teori George C. Edwards III (1980)

Menurut George C Edwards III (dalam Parawangi, 2011), terdapat empat faktor yang bekerja secara simultan dan berinteraksi satu sama lain untuk membantu dalam proses implementasi, maka pendekatan yang ideal adalah dengan cara merefleksikan kompleksitas ini dengan keempat faktor yaitu: komunikasi, sumber-sumber, sikap pelaksana (kecenderungan-

kecenderungan) atau tingkah laku dan struktur birokrasi. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a) Komunikasi

Faktor implementasi ini akan bekerja secara efektif dan efisien jika ukuran dan tujuan kebijakan dipahami oleh mereka yang bertanggung jawab untuk mencapai tujuan kebijakan tersebut. Kejelasan tentang ukuran dan tujuan kebijakan oleh karena itu perlu dikomunikasikan secara memadai kepada para pelaku. Keseragaman dan konsistensi dalam kaitannya dengan tindakan dan tujuan yang mendasarinya membutuhkan komunikasi yang baik sehingga pembuat kebijakan dapat memahami dengan benar ukuran dan tujuan kebijakan. Komunikasi dalam suatu organisasi merupakan proses yang sangat kompleks. Seseorang menggunakan atau mendistribusikannya hanya untuk tujuan tertentu.

Selain itu, adanya informasi yang berbeda juga akan menghasilkan interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasinya efektif, tentunya ada pihak yang bertanggung jawab dalam mengambil keputusan dan perlu memahami jika mampu melakukannya. Bahwasanya suatu implementasi kebijakan harus diterima oleh semua pihak maupun personel agar dapat dipahami dengan jelas dan akurat terkait dari maksud dan tujuan kebijakan. Jika ada para pembuat kebijakan melihat adanya ketidakjelasan dalam spesifikasi kebijakan, maka tentunya mereka tidak memahami dengan apa yang sesungguhnya yang akan

diarahkan. Para implementor kebijakan akan merasa bingung dengan apa yang mereka lakukan sehingga jika dipaksakan tidak akan mendapatkan hasil yang efektif dan optimal. berkurangnya komunikasi kepada para implementor maka akan berdampak pada implementasi kebijakan.

b) Sumber-sumber (Sumber daya)

Untuk implementasi kebijakan yang efektif, sumber daya dapat menjadi faktor yang penting dalam pelaksanaan kebijakan publik, termasuk kepegawaian yang memadai dan keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas, wewenang dan fasilitas yang dibutuhkan untuk menerjemahkan usul di kertas untuk digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, yaitu personel, informasi, kekuatan dan fasilitas.

c) Sikap Pelaksana (kecenderungan-kecenderungan sikap perilaku)

Faktor yang mempengaruhi efektif tidaknya implementasi kebijakan adalah sikap pelaksana. Jika pelaksana setuju dengan poin atau bagian dari konten kebijakan maka mereka akan dengan senang hati melakukannya, tetapi jika pandangan mereka berbeda dari pembuat keputusan maka prosesnya implementasi akan menemui kesulitan bahkan menimbulkan banyak masalah. Ada tiga bentuk sikap atau tanggapan implementor terhadap suatu kebijakan; yaitu, kesadaran pelaksana dan pelaksanaan instruksi untuk menanggapi program ke arah penerimaan dan penolakan, serta intensitas reaksi. Para pelaksana mungkin dapat memahami maksud dari sasaran program tetapi

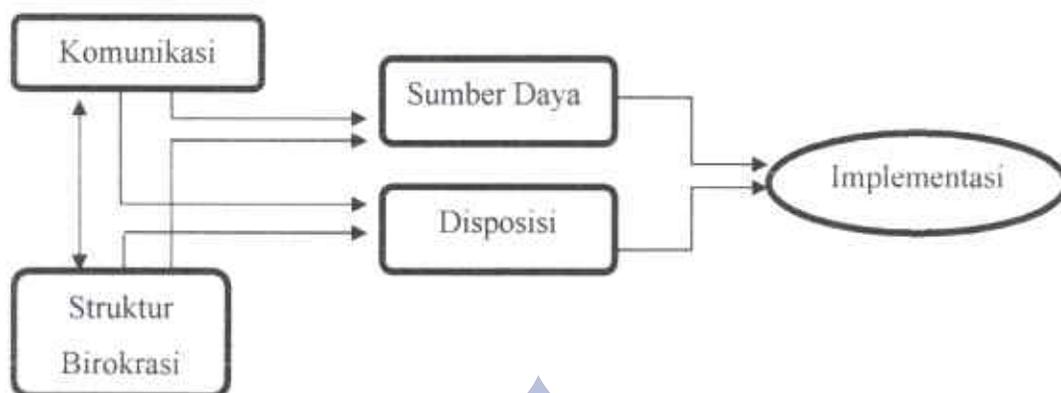
seringkali tujuannya tidak tercapai dengan tepat karena mereka menolak tujuan yang ada sehingga secara diam mereka alihkan dan menghindari implementasi dari program tersebut. Selain itu dukungan dari pejabat pelaksana sangat dibutuhkan agar dapat mencapai tujuan maupun sasaran program.

Dukungan para pimpinan pelaksana sangat berkontribusi sangat berdampak pada pelaksanaan program sehingga dapat berhasil dalam mencapai tujuannya. Bentuk dukungan kepemimpinan ini antara lain menempatkan kebijakan sebagai prioritas program, menempatkan pelaksana diantara mereka yang mendukung program, dan memperhatikan keseimbangan wilayah, agama, jenis kelamin, etnis serta karakteristik demografi lainnya selain itu indikator ini menyediakan sumber daya yang cukup untuk memberi mereka insentif bagi pelaksana program mendukung dan bekerja penuh dengan implementasi program.

d) Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi tidak lepas dari lembaga pelaksana kebijakan. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma, dan pola hubungan yang berulang. Badan eksekutif memiliki potensi atau kaitan nyata dengan apa yang mereka miliki dalam pelaksanaan kebijakan.

Adapun gambar kerangka model implementasi dari 4 faktor penentu sebagai berikut:



Gambar 2.1
Model Implementasi Menurut Edwards III : 1980

Sumber : (Parawangi, 2011)

2. Teori Menurut Daniel A. Mazmanian & Paul A. Sabatier (1983)

Menurut Mazmanian & Sabatier (dalam Parawangi, 2011), peran penting dari suatu analisis implementasi kebijakan yaitu mengidentifikasi variabel-variabel yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan formal pada suatu proses implementasi. Adapun tiga variabel yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi, yaitu:

a. Mudah tidaknya masalah yang akan dikendalikan, meliputi:

1) Dukungan Teori Dan Teknologi

Dalam tercapainya tujuan dalam suatu program tergantung dari dukungan teori serta suatu teknologi dalam mengembangkan kemampuan untuk indikator-indikator dalam suatu dukungan teori serta teknologi yang digunakan.

2) Keragaman Perilaku Kelompok Sasaran

Semakin beragam terhadap dalam kelompok sasaran, maka akan semakin beragam terhadap pelayanan yang diberikan, sehingga sulit

untuk membuat peraturan yang tegas serta jelas. Maka dari itu besar pula kebebasan bertindak yang harus dikontrol oleh para pejabat pelaksana di lapangan.

3) Persentase populasi sebagai kelompok sasaran

Semakin kecil dan semakin jelas perilaku yang perlu diubah (melalui implementasi kebijakan), maka semakin besar juga peluang dalam memobilisasikan dukungan politik kepada sebuah kebijakan maka akan lebih terbuka juga peluang terhadap pencapaian tujuan kebijakan

4) Tingkat perubahan perilaku yang berlaku

Perubahan perilaku yang semakin besar dikehendaki oleh suatu kebijakan, maka akan semakin sulit para pelaksana memperoleh implementasi yang berhasil.

b. Kemampuan terhadap keputusan kebijakan secara terstruktur dengan tepat dalam proses implementasi, meliputi:

1) Kejelasan dan konsistensi tujuan

Dalam proses implementasi tujuan yang jelas sangat berperan bagi sumber-sumber terhadap para aktor yang terlibat, baik dalam lembaga dan diluar lembaga, maka dari itu, semakin mampu suatu peraturan memberikan suatu petunjuk yang konsistensi serta disusun dengan jelas dengan urutan kepentingan terhadap para pejabat pelaksana, maka akan semakin besar pula output kebijakan dari badan pelaksana yang akan sejalan dengan petunjuk tersebut.

2) Digunakan teori kasual yang memadai

Dalam teori kasualitas yaitu perlunya adanya hubungan timbal balik antara campur tangan dari pemerintah dari satu pihak, dan dapat tercapainya tujuan dari program yang dapat dipahami dengan jelas.

3) Ketepatan alokasi sumber dana

Dalam hal ini merupakan salah satu faktor penentu dalam suatu program pelayanan masyarakat apapun. Karena dengan tersedianya dana sangat diperlukan agar dapat membuka peluang untuk mencapai tujuan-tujuan yang formal.

4) Keterpaduan hirarki diantara Lembaga pelaksana

Salah satu hal penting yang perlu dimiliki pada setiap peraturan perundang-undangan yang baik yaitu kemampuan untuk memadukan hirarki diantara lembaga-lembaga pelaksana. Sehingga dengan hal tersebut terjadi maka koordinasi antar suatu instansi yang bertujuan untuk mempermudah suatu implementasi kebijakan justru akan membayarkan tujuan dari kebijakan yang telah ditetapkan.

5) Aturan-aturan keputusan dari badan pelaksana

Dengan adanya aturan, dapat memberikan kejelasan konsistensi terhadap tujuan, memperkecil suatu hambatan, dan dapat melakukan kepatuhan terhadap kelompok sasaran, dengan adanya undang-undang dapat mempengaruhi proses implementasi dengan cara menggariskan aturan-aturan pembuat keputusan dari badan pelaksana.

6) Rekrutmen pejabat pelaksana

Dalam hal ini merupakan cara yang ditempuh pembuat peraturan dengan merekrut demi menjamin agar memiliki kesepakatan yang dapat disyaratkan demi tercapainya tujuan.

7) Keterbukaan kepada pihak luar

Faktor yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu sejauhmana peluang yang terbuka bagi para aktor terhadap partisipasinya diluar badan pelaksana yang dapat mendukung tujuan resmi.

c. Pengaruh langsung dari variabel politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang terdapat dalam keputusan kebijakan, yaitu:

1) Kondisi sosial, ekonomi & teknologi

Dalam perbedaan kondisi sosial, ekonomi maupun teknologi sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan yang digariskan dalam undang-undang. Karenanya, eksternal dari faktor ini juga menjadi hal yang penting untuk diperhatikan agar keberhasilan suatu kebijakan publik.

2) Dukungan publik

Hakikat terhadap perhatian publik yang bersifat sesaat yang menjadi kesulitan-kesulitan tertentu. Karena untuk mencapai hasil dari implementasi kebijakan program membutuhkan dukungan dari instansi atasan baik untuk alokasi anggaran maupun perlindungan terhadap aktor yang tidak mendukung kebijakan yang ada.

3) Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok-kelompok

Perubahan sikap yang akan dicapai terhadap suatu kebijakan publik, akan berhasil apabila ditingkat masyarakat memiliki sikap yang kondusif terhadap kebijakan yang ada. Maka dengan adanya kearifan local yang dimiliki warga dapat mempengaruhi keberhasilan maupun ketidakberhasilan implementasi kebijakan publik.

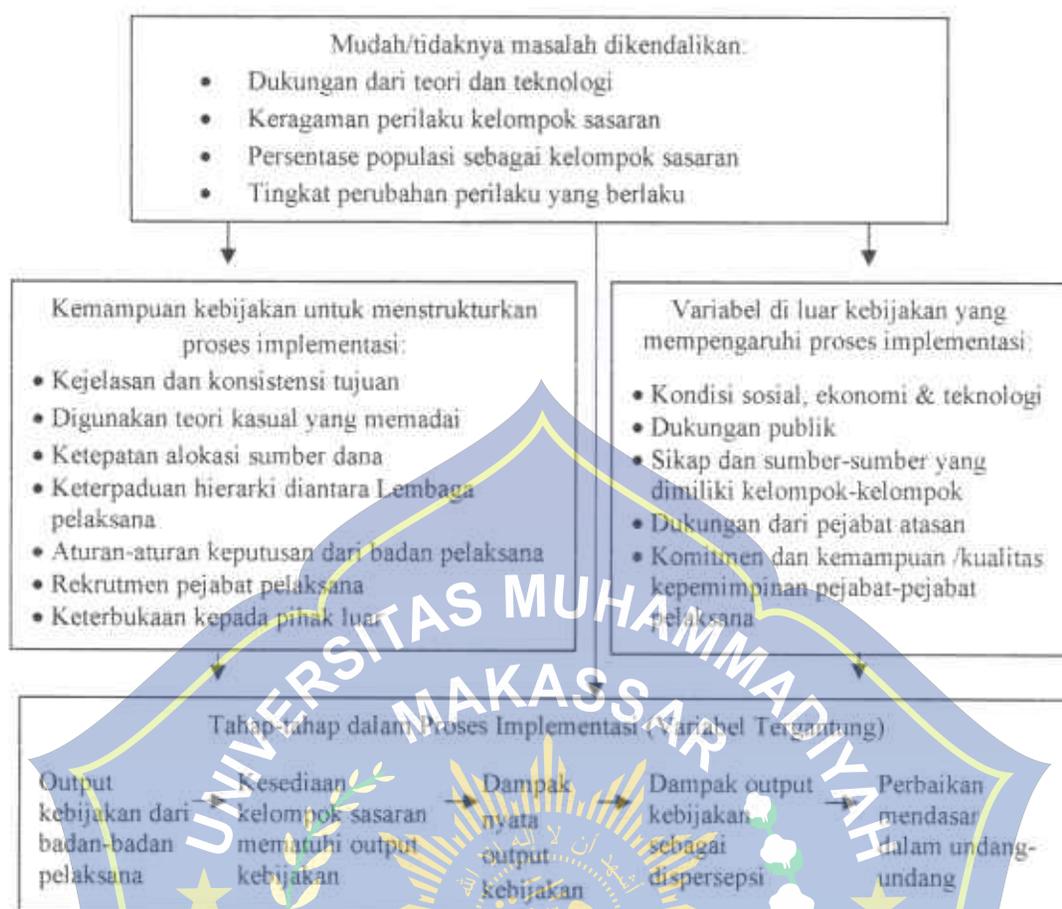
4) Dukungan dari pejabat atasan

Lembaga dari pejabat atasan dapat memberikan dukungan terhadap tujuan undang-undang dari arah pengawasan, serta ketersediaan sumber-sumber keuangan.

5) Komitmen dan kemampuan/kualitas kepemimpinan pejabat-pejabat pelaksana

Variabel yang sangat berpengaruh langsung terhadap output kebijakan dari pejabat pelaksana yaitu komitmen para pejabat pelaksana terhadap upaya mewujudkan tujuan undang-undang. Selain itu, kemampuan berinteraksi antar lembaga maupun individu didalam suatu lembaga, agar dapat mensukseskan implementasi kebijakan merupakan hal yang penting keberhasilan dari kinerja kebijakan publik.

Pada gambar berikut, variabel tersebut sebagai variabel bebas (*independent variable*) dibedakan dari tahap-tahap implementasi yang harus dilalui yang disebut variabel tergantung (*dependent variable*).



Adapun Langkah-langkah pada Proses Implementasi sebagai variabel yang dipengaruhi (Variabel Tergantung), sebagai berikut:



Gambar 2.2
Variabel-variabel Proses Implementasi Menurut Mazmanian & Paul S. Sabatier, (1983:22)

Sumber: (Parawangi, 2011)

3. Teori menurut Marille S. Grindle (1980)

Dari teori Marille S. Grindle (1980), dimana dipengaruhi oleh dua variabel besar, yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan

implementasi (*context of implementation*). Seperti pada gambar dibawah ini.



Gambar 2.3

Implementasi sebagai proses Politik dan Administrasi menurut Marille S. Grindle (1980)

Sumber: (Parawangi, 2011)

Variabel isi kebijakan mencakup yaitu (1) sejauh mana kepentingan dari kelompok sasaran tersebut yang terdapat didalam isi kebijakan, (2) jenis manfaat oleh kelompok sasaran/target, (3) sejauh mana perubahan yang diinginkan terhadap sebuah kebijakan tersebut, (4) dilihat letak sebuah program apakah sudah tepat, (5) apakah sebuah kebijakan telah menentukan pelaksana program dengan baik dan rinci, dan (6) ketersediaan sumber daya

yang memadai sehingga dapat mendukung suatu implementasi program tersebut.

Adapun variabel lingkungan implementasi yaitu: (1) dimana kekuasaan, kepentingan serta suatu strategi yang dimiliki para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan, (2) karakteristik institusi yang sedang berkuasa demi mewujudkan tujuan kebijakan, dan (3) para pejabat pelaksana harus memiliki tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

D. Konsep Program Kampung Keluarga Berencana

Mendengar istilah "Kampung", kesan yang muncul di benak pasti akan tertuju pada tempat dimana sekelompok orang atau keluarga yang hidup dengan segala keterbelakangan, keterbatasan, tertinggal, kolot, kumuh, terasing, dan beberapa kampung lainnya nama yang terkait.

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa kampung sangat identik dengan istilah seperti itu, begitu pula dengan istilah Kampung KB yang belakangan ini menjadi ikon yang cukup populer tidak hanya dikalangan pengelola program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKB-PK) dalam hal ini BKKBN, namun juga banyak dibahas oleh instansi departemen dan non departemen, mulai dari tingkat daerah hingga pusat.

Tujuan dibentuknya Kampung KB yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau sederajat melalui program KKBPK dan pembangunan sektor terkait lainnya untuk mewujudkan keluarga kecil yang berkualitas. Sementara itu, secara khusus Kampung KB ini dibuat selain untuk meningkatkan peran serta lembaga pemerintah, non pemerintah

dan swasta dalam memfasilitasi, membantu dan membina masyarakat dalam menyelenggarakan program KKBPK dan pembangunan sektor terkait, serta dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembangunan berwawasan kependudukan.

Ada tiga hal pokok yang bisa dijadikan pertimbangan sebagai syarat berdirinya Kampung KB dalam suatu wilayah, yaitu: pertama, ketersediaan data kependudukan yang akurat. Kedua, dukungan serta komitmen Pemerintah Daerah. Dan Ketiga, partisipasi aktif masyarakat.

Adapun Indikator Keberhasilan dari Program Kampung KB yaitu:

- a) Peserta KB yang semakin bertambah.
- b) Pertumbuhan penduduk yang menurun.
- c) Angka kemiskinan menurun.
- d) Pernikahan usia dini yang berkurang.

Dalam memilih serta menentukan wilayah yang akan dijadikan lokasi Kampung KB, digunakan tiga kriteria, yaitu:

- a) Kriteria utama yang meliputi dua hal, yaitu:
 - 1) Jumlah Keluarga pra sejahtera dan KS I (miskin) di atas rata-rata pra sejahtera dan KS I di tingkat desa/kelurahan tempat kampung tersebut berada.
 - 2) jumlah peserta KB di bawah rata-rata pencapaian peserta KB di tingkat desa/kelurahan tempat kampung KB berada.

b) Kriteria wilayah: meliputi 10 kategori wilayah (dipilih salah satu),

yaitu:

- (1) Kumuh,
- (2) Pesisir,
- (3) Daerah Aliran Sungai (DAS),
- (4) Tanggul Kereta Api,
- (5) Daerah Miskin (termasuk Miskin Perkotaan),
- (6) Terpencil,
- (7) Perbatasan,
- (8) Kawasan Industri,
- (9) Kawasan Wisata,
- (10) Penduduk yang padat.

Selain itu, dalam menentukan kriteria suatu wilayah yang akan dijadikan lokasi pembentukan Kampung KB dapat dipilih satu atau lebih dari sepuluh kriteria yang ada.

c) Kriteria Khusus: meliputi 5 aspek, yaitu:

- (1) Setiap RT/RW memiliki standar Data Keluarga dan Data Peta,
- (2) Kriteria kependudukan untuk rendahnya angka partisipasi penduduk usia sekolah,
- (3) Peserta KB aktif berKB dan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) lebih rendah dari rata-rata pencapaian tingkat desa/kelurahan dan tingkat kebutuhan yang tidak terpenuhi lebih tinggi dari rata-rata tingkat desa/kelurahan,

(4) Kriteria partisipasi keluarga dalam membangun keluarga tangguh, pemberdayaan ekonomi dan partisipasi remaja dalam kegiatan GenRe melalui PIK-R masih rendah,

(5) kriteria program pembangunan sektor terkait yang mencakup setidaknya empat bidang, yakni kesehatan, ekonomi, pendidikan, pemukiman dan lingkungan, dan masih bisa ditambah dengan program lainnya sesuai dengan perkembangan.

Sasaran kegiatan merupakan subyek dan obyek dalam pelaksanaan kegiatan operasional di Kampung KB selain keluarga PUS, lansia, dan remaja dan keluarga yang mempunyai balita, keluarga yang memiliki remaja dan keluarga yang memiliki lansia. Sedangkan sasaran sektoral disesuaikan dengan tugasnya, yang dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah, Ketua RW, Ketua RT, PKB (Penyuluh Keluarga Berencana), Petugas lapangan sektor terkait, TP PKK, kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dalam hal ini PPKBD dan Sub PPKBD, tokoh masyarakat, serta kader pembangunan lainnya.

Sejak Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo) mencanangkan Kampung KB pada Januari 2016 lalu, Kampung KB telah banyak dibicarakan di masyarakat, mulai dari kalangan bawah, kelas menengah hingga kalangan elit, bahkan sudah dimuat di kolom berita media massa (koran, majalah, tabloid), bahkan menjadi berita yang sangat populer di media elektronik.

Meskipun pembentukan Kampung KB merupakan amanah dari BkkbN, akan tetapi pada prinsipnya Kampung KB merupakan sinergi antara beberapa

kementerian terkait dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, mitra kerja, dan pemangku kepentingan, serta tidak mengabaikan keterlibatan langsung masyarakat setempat. Oleh karena itu Kampung KB ini diharapkan menjadi miniatur atau gambaran (potret) dari sebuah desa yang didalamnya terdapat keterpaduan dari program pembangunan Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga yang disinergikan dengan program pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis.

Hal ini sejalan dengan definisi dari Kampung KB itu sendiri yaitu "suatu kesatuan wilayah setingkat RW, dusun atau sedemajit, yang memiliki kriteria tertentu, dimana Program KKBPK dan pembangunan sektor terkait secara terpadu yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis".

Dengan demikian, Kampung KB sebenarnya dirancang sebagai upaya pemantapan, penyegaran, revitalisasi program KKBPK untuk mendekatkan pelayanan kepada keluarga dan masyarakat dalam rangka memutakhirkan dan menerapkan 8 (delapan) fungsi keluarga secara utuh dalam masyarakat. Dengan demikian, kegiatan yang dilakukan di Kampung KB tidak hanya identik dengan penggunaan dan pemasangan alat kontrasepsi, tetapi merupakan program pembangunan terpadu dan terintegrasi dengan berbagai program pembangunan lainnya.

Sehingga wadah Kampung KB ini dapat kita jadikan sebagai wahana pemberdayaan masyarakat melalui berbagai macam program yang mengarah pada upaya merubah sikap, prilaku dan cara berfikir (mindset) masyarakat

kearah yang lebih baik, sehingga kampung yang tadinya tertinggal dan terbelakang dapat sejajar dengan kampung-kampung lainnya, masyarakat yang tadinya tidak memiliki kegiatan dapat bergabung dengan poktan-poktan yang ada, keluarga yang tadinya tidak memiliki usaha dapat bergabung menjadi anggota UPPKS yang ada.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sendiri semakin menggaris bawahi kewenangan ini, dimana dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bersamaan Antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota di bawah huruf N (Pembagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana) mempertegas kewenangan pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan KB antara pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Ada empat sub-urusan di bidang pengendalian kependudukan dan keluarga berencana yang harus dilaksanakan oleh setiap tingkatan komando, yaitu: Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera serta Sertifikasi dan Standarisasi.

Maka dari itu kampung KB ini didirikan karena ada beberapa alasan yang melatar belakangi, yaitu : (1) Program KB tidak lagi bergema dan terdengar seperti pada zaman orde baru, (2) untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang sederajat dengan program KKBPK dan pembangunan sektor terkait dalam rangka penyelenggaraan keluarga kecil berkualitas, (3) penguatan program KKBPK yang dikelola dan

diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat, (4) terlaksananya cita-cita pembangunan Indonesia menjabarkan dalam Nawacita, khususnya program prioritas ke 3 yaitu "Memulai pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kesatuan negara" dan Prioritas 5 Agenda yaitu "Meningkatkan kualitas hidup penduduk Indonesia", (5) menggalang dan merevitalisasi program KB untuk memenuhi tercapainya bonus demografi yang akan dilaksanakan pada tahun 2010-2030 (BKKBN, 2019).

Tujuan Program KB yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, bangsa dan negara melalui cara yaitu menurunkan angka kelahiran. Dalam UU No. 52 Tahun 2009 pasal 21 ayat 2 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, disebutkan bahwa kebijakan program KB bertujuan untuk:

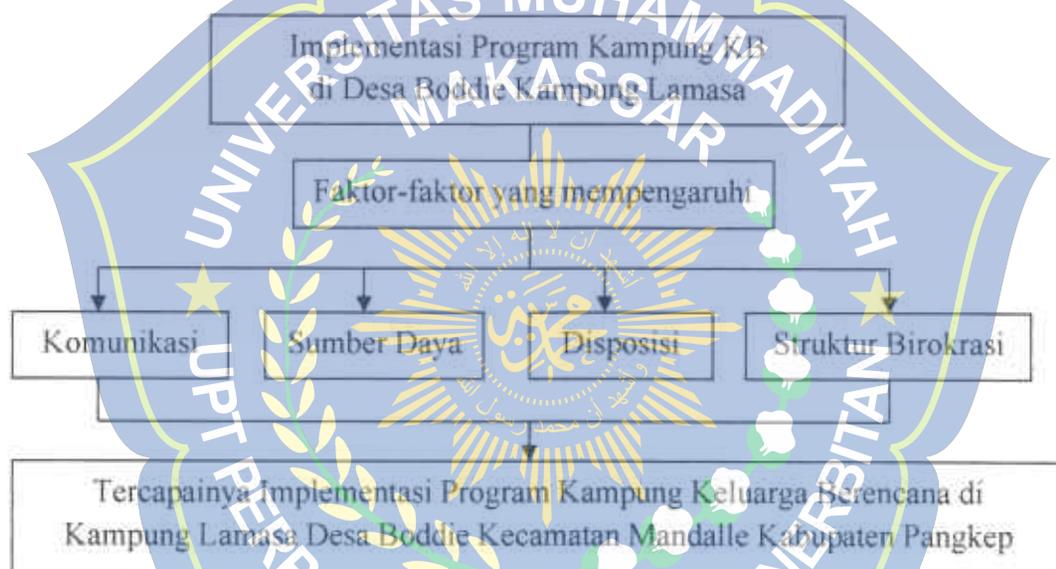
- 1) Mengatur kehamilan sesuai keinginan.
- 2) Tetap menjaga Kesehatan dan menurunkan angka kematian ibu, bayi, dan anak.
- 3) Meningkatkan akses dan kualitas informasi, Pendidikan, konseling, pelayanan KB maupun Kesehatan reproduksi.
- 4) Meningkatkan partisipasi dari kesertaan pria dalam praktek KB.
- 5) Mempromosikan penyusunan bayi guna untuk mengatasi kehamilan.

(Sumber: Ratmawati, 2019)

E. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini adalah model konseptual yang berkaitan dengan teori-teori seputar Implementasi Kebijakan Publik.

Penelitian dengan judul “Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana Di Desa Boddie Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep” berpedoman pada teori George C. Edwards III, 1980 (dalam Parawangi, 2011), tentang model implementasi kebijakan publik yaitu perlunya ada keempat faktor yaitu : komunikasi, sumber-sumber, sikap pelaksana (kecenderungan-kecenderungan) atau tingkah laku dan struktur birokrasi. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka model kerangka pikir dalam penelitian yaitu sebagai berikut:



Gambar 2.4 Kerangka Pikir

F. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan dalam Program Kampung Keluarga Berencana terkhususnya Di Kampung Lamasa Desa Boddie Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep.

G. Deskripsi Fokus

Sesuai dengan fokus penelitian, adapun deskripsi dalam fokus penelitian tersebut, yaitu:

1) Komunikasi

Komunikasi yang menyangkut dengan proses menyampaikan suatu informasi atau transmisi kepada masyarakat terkait dengan pelaksanaan program Kampung KB seperti melakukan sosialisasi, rapat koordinasi bersama kepala RT dan organisasi eksternal lainnya.

2) Sumber Daya (Resources)

Sumber Daya yang mendukung pelaksanaan dari kebijakan yaitu ketersediaan staf atau pelaksana dari yang menangani program kampung Keluarga Berencana (KB) yang ada. Kemudian adanya fasilitas (sarana prasarana) yang disediakan oleh pelaksana kebijakan di wilayah kampung Lamasa Desa Boddie, serta Sumber Daya Anggaran yang ada guna menunjang proses implementasi kebijakan terkait Program Kampung Keluarga Berencana (KB).

3) Disposisi/Sikap Pelaksana

Disposisi/Sikap Pelaksana yaitu pembagian tugas yang dilakukan oleh PPKBD Desa Boddie dalam melaksanakan program kampung Keluarga Berencana (KB) dengan memperhatikan pengetahuan yang dimiliki serta sikap pelaksana terhadap program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Kampung Lamasa Desa Boddie Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep.

4) Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yaitu hubungan antara unit-unit organisasi yang ada di dalam maupun diluar struktur PPKBD Desa Boddie. Staff dari

pelaksana kebijakan tersebut diatur sesuai penempatannya setiap unit kerja dalam struktur organisasi dan dilaksanakan sesuai peran serta tugasnya masing-masing.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2021 s.d. 18 Agustus 2021 selama kurang lebih dua bulan. Adapun Lokasi penelitian dilakukan di Kampung Lamasa Desa Boddie Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep. Dengan fokus Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (KB). Alasan pemilihan lokasi ini karena merupakan kampung yang dicanangkan program Kampung KB.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berupa penjabaran data dalam bentuk kata-kata ataupun berwujud sebuah pernyataan mengenai strategi pemerintah dalam pendalian penduduk dengan program keluarga berencana. Menurut Sugiyono (2005:1) (dalam buku Dr. Haroani Pasolong, M.Si 2013, hal 161) Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, sebagai lawannya adalah eksperimen, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* dari pada *generalisasi*.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan peneliti adalah deskriptif yaitu penelitian yang mendeskripsikan, menggambarkan, dan menjelaskan data, informasi ataupun pengalaman informan yang berhubungan terhadap Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana di Desa Boddie Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep.

C. Sumber Data

Data adalah catatan kumpulan fakta. Dalam keilmuan, fakta dikumpulkan dan kemudian menjadi data. Kemudian data tersebut diolah agar dapat dideskripsikan secara jelas dan akurat sehingga dapat dipahami oleh orang lain yang mengalaminya secara tidak langsung. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya. Data tersebut diperoleh melalui narasumber atau informan atau dalam istilah lain responden yaitu orang yang digunakan sebagai sarana untuk memperoleh informasi atau data di lokasi dimana penelitian dilakukan.
2. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian. Jadi data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber dan bahan bacaan atau dokumentasi yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder yang dimaksud meliputi buku, jurnal, hukum, hasil penelitian berupa laporan dan media informasi lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

D. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, Informan penelitian menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan adanya pertimbangan tertentu. Dimana pertimbangannya adalah orang yang memiliki pengetahuan yang luas dan mampu menjelaskan sesuai dengan apa yang ingin diteliti. Adapun informan yang telah ditentukan oleh peneliti dalam pelaksanaan penelitian ini yaitu:

Tabel 3.1 Informan penelitian

NO	NAMA	INISIAL	JABATAN
1.	Muh. Jufri, S.Sos	MJ	Pengendali PLKB Kecamatan Mandalle
2.	Nurhatijah	NH	PKB Desa Boddie
3.	Hasmawati	HW	PPKBD Desa Boddie
4.	Hajerah	HJ	Masyarakat yang ikut berpartisipasi
5.	Masriani	MS	Masyarakat yang ikut berpartisipasi

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, Teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui setting dari berbagai sumber dan berbagai cara. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teknik wawancara, teknik observasi dan teknik dokumentasi.

I. Teknik Observasi

Teknik observasi merupakan suatu pencatatan dan pengamatan secara langsung yang sistematis terhadap Implementasi Program

Kampung Keluarga Berencana (KB) di Desa Boddie Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep.

2. Teknik Wawancara

Menurut Esterberg (Sugiyono, 2005:72), wawancara merupakan suatu pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan teknik wawancara semi berstruktur sebagai salah satu teknik pengumpulan data. Ini didasarkan pada instrumen dan metode penelitian yang dipakai oleh peneliti dimana data sangat bergantung pada pemahaman peneliti bukan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan dalam angket untuk menemukan data.

3. Studi Dokumentasi

Dalam penelitian ini, studi dokumen akan mendukung hasil dari wawancara dan observasi. Jadi ketiga teknik pengumpulan data ini akan saling melengkapi dan mendukung. Oleh karena itu, peneliti memakai teknik wawancara, observasi, dan studi dokumen dalam pengumpulan data.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif yaitu dilakukan sebelum terjun ke lapangan, selama dan setelah selesai di lapangan. Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan pada proses di lapangan seiring dengan pengumpulan data. Padahal, analisis data kualitatif

berlangsung pada proses pengumpulan data, bukan setelah pendataan selesai. Tahapan analisis data selama proses di lapangan beserta pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti meringkas, memilih hal yang paling penting, memfokuskan pada hal yang paling penting, mencari motif dan pola, dan menghilangkan yang tidak perlu. Dengan cara ini, data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan memudahkan peneliti untuk melanjutkan pengumpulan data.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kumpulan informasi yang memungkinkan untuk dilakukan kesimpulan penelitian. Pada bagian ini, data yang disajikan telah di sederhanakan dengan mereduksi data dan harus ada gambaran secara keseluruhan dari kesimpulan yang diambil.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman (1984) adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Kesimpulan yang dibuat peneliti apabila didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

G. Teknik Pengabsahan Data

Dalam pengabsahan data dari penelitian ini adalah Triangulasi. Menurut (Sugiyono, 2014) Triangulasi yaitu sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik dan sumber data yang ada. Triangulasi terbagi menjadi tiga bagian yaitu:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi Sumber dilaksanakan dengan cara memeriksa data yang diperoleh dari berbagai sumber. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan dan menguji data yang diperoleh melalui hasil observasi, wawancara, dan dokumen yang ada. Kemudian peneliti akan membandingkan hasil observasi dengan wawancara membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi Teknik dilaksanakan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk menemukan dari sumber yang sama. Informasi atau data yang ditemukan melalui wawancara diperiksa dengan observasi dan dokumen. Jika ketiga teknik pengujian kredibilitas data menghasilkan data yang berbeda, maka penelitian akan membahas lebih lanjut dengan informan terkait atau pihak lain untuk menyakinkan data mana merupakan data yang benar ataupun bisa saja semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.

3. Triangulasi Waktu

Bukan hanya sumber atau teknik yang sering mempengaruhi kredibilitas data, tapi juga Triangulasi Waktu. Data yang didapatkan narasumber bervariasi dan berbeda seperti pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara yang dilakukan di pagi hari saat narasumber masih segar, belum adanya masalah, dan memberikan informasi yang akurat agar informasi yang diberikan semakin meyakinkan. Oleh karena itu dalam hal pengujian kredibilitas data dapat dilaksanakan dengan melakukan pengecekan melalui wawancara, observasi, atau teknik lain pada waktu atau situasi yang berbeda.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab IV ini akan memaparkan hasil penelitian yang dilakukan terkait dengan judul Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana di Desa Boddie Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep dan Lokasi kampung KB ini terletak di Kampung Lamasa Desa Boddie.

a. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Pangkep



Gambar 4.1. Peta Wilayah Kabupaten Pangkep

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah merupakan Kabupaten yang terletak di Pantai barat Sulawesi Selatan atau berjarak kurang lebih 51 Km dari ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan terletak diantara $04^{\circ} 40'$ - $08^{\circ} 00'$ Lintang

Selatan (LS) dan 110° Bujur Timur (BT) dengan batas-batas administrasi:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Barru
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Maros
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bone
- Berbatasan dengan Pulau Kalimantan, Pulau Jawa dan Madura, Pulau Nusa Tenggara dan Pulau Bali.

Secara Administratif luas wilayah Kabupaten Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebesar $12.311,43 \text{ Km}^2$ yang terdiri dari $898,29 \text{ Km}^2$ wilayah daratan dan $11.464,44 \text{ Km}^2$ wilayah kepulauan, terbagi dalam 13 kecamatan, 9 kecamatan terletak didaratan dan 4 kecamatan terletak di kepulauan.

Tabel 4.1 Wilayah Kabupaten Pangkep

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan
1.	Balocci	5
2.	Bungoro	8
3.	Labbakkang	13
4.	Liukang Tangaya	9
5.	Liukang Kalmas	7
6.	Liukang Tupabbiring	9
7.	Liukang Tupabbiring Utara	7
8.	Mandalle	6
9.	Ma'rang	10
10.	Minasatene	8
11.	Pangkajene	9
12.	Segeri	6
13.	Tondong Tallasa	6
	Jumlah	103

Sumber: Profil Daerah Kabupaten Pangkep, 2020

Adapun jumlah penduduk menurut kecamatan yang ada di kabupaten pangkep berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Jumlah penduduk berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Pangkep

Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Tondong Tallasa	4.931	5.168	10.099
Mandalle	6.789	7.236	14.025
Lukang Tupabbiring Utara	6.793	6.772	13.565
Liukang Kalmas	7.294	7.324	14.618
Balocci	8.112	8.448	16.560
Liukang Tupabbiring	8.900	8.828	17.728
Liukang Tangaya	9.456	9.893	19.349
Segeri	10.970	11.369	22.339
Ma'rang	16.763	17.638	34.401
Minasatene	19.068	19.872	38.940
Bungoro	21.582	22.297	43.879
Pangkajene	23.864	24.792	48.656
Labbakkang	24.932	26.684	51.616
Kabupaten Pangkajene dan kepulauan	169.354	176.321	345.775

Sumber: BPS Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020

2. Gambaran Umum Kecamatan Mandalle

Kecamatan Mandalle merupakan daerah ujung kabupaten pangkep dengan jarak ke ibukota 30 km, dimana luas wilayah kecamatan Mandalle 78,28 KM². Adapun batas-batas administrasi sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Barru
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Segeri
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Barru

Dimana terdapat 6 Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan Mandalle, Adapun nama desa di Kecamatan Mandalle yaitu:

- Desa Benteng
- Desa Manggalung
- Desa Boddie

- d. Desa Coppo Tompong
- e. Desa Mandalle
- f. Desa Tamarupa

Adapun jumlah data kependudukan setiap desa yang ada di Kecamatan Mandalle pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3 Data Kependudukan Kecamatan Mandalle Pada tahun 2020

No.	Nama Desa	Data Kependudukan Tahun 2020		
		Jumlah Individu	Jumlah KK	Jumlah RT
1.	Benteng	3329	942	19
2.	Manggalung	2024	752	13
3.	Tamarupa	2267	758	18
4.	Mandalle	2607	802	8
5.	Boddie	2662	750	14
6.	Coppo Tompong	1845	538	10
	Total	140.628	41.251	641

Sumber: Data Kependudukan Kecamatan Mandalle Tahun 2020

3. Gambaran khusus lokasi konsentrasi penelitian

Wilayah Kampung KB ini pertama kali dicanangkan di kecamatan Mandalle terletak di Desa Boddie Terkhususnya di Kampung Lamasa. Secara Administratif, Kampung KB Lamasa Desa Boddie terbagi menjadi 3 dusun, yaitu Dusun Lamasa, Dusun Boddie dan Dusun Lembangeng yang terdiri dari 7 RK, dimana masing-masing RK dikepalai oleh pejabat RK yaitu Ketua RK serta ada 14 RT dan Kepala Dusun dimana di kepalai oleh Kepala Dusun.

Kampung KB Lamasa merupakan salah satu kampung yang ada di Kabupaten Pangkep dimana berada dari 6 Desa yang ada di wilayah Kecamatan Mandalle yang secara tipologi wilayahnya terbentang dan

memanjang dari selatan ke utara dengan luas wilayah +9,12 Km². Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tamarupa
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Benteng
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Manggalung
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar.



Gambar 4.2 Peta Desa Boddie

Dari data yang didapatkan pada kantor Desa Boddie Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep pada satu tahun terakhir yaitu tahun 2020 bahwa jumlah rumah tangga sebanyak 762 kepala keluarga. Jumlah penduduk yang ada di Desa Boddie berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 4.4 (Sumber: Data Desa Boddie), di bawah ini:

Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Desa Boddie Tahun 2020

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)
1.	Laki-Laki	1.280
2.	Perempuan	1.297
	Jumlah	2.577

Adapun Visi dan Misi dari Desa Boddie yaitu:

a. Visi

Visi yaitu gambaran tentang masa depan yang ingin diwujudkan. Visi juga berkaitan untuk pandangan kedepan bagaimana Desa Boddie diarahkan untuk berkarya. Maka dari itu ditetapkan Visi dari Desa Boddie yaitu "Terbentuknya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih untuk mewujudkan Masyarakat Desa Boddie yang Unggul, Kreatif dan Mandiri".

b. Misi

Misi yaitu sesuatu yang akan dilaksanakan sebagai penjabaran visi yang sudah ditetapkan. Dengan adanya misi berarti seluruh staf yang ada di Desa Boddie harus mengenal institusinya dan harus mengetahui program-program apa yang akan dijalankan di masa yang akan datang.

Adapun Misi dari Desa Boddie, yaitu

- 1) Menyelenggarakan Pemerintahan yang melayani dan mengayomi masyarakat.
- 2) Menyelenggarakan Pemerintahan yang Amanah, jujur dan transparan.
- 3) Meningkatkan produksi hasil-hasil Pertanian, Perikanan, dan Peternakan.
- 4) Meningkatkan Perekonomian dan mutu kesejahteraan masyarakat untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik.

4. Struktur Organisasi Kampung KB Desa Boddie

STRUKTUR PENGURUS KELOMPOK KERJA (POKJA) KAMPUNG KB DESA BODDIE KECAMATAN MANDALLE KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN



Gambar 4.3 Struktur Organisasi Pengurus Kampung KB Desa Boddie

B. Hasil Penelitian

Program Kampung KB merupakan program yang dibuat oleh pemerintah yaitu BKKBN, dimana dalam suatu daerah memiliki Dinas Pengendalian Penduduk. Program ini adalah program suatu pemberdayaan masyarakat yang berbasis keluarga dan komunitas. Program tersebut dijalankan guna menekan masalah pertumbuhan penduduk serta masyarakat dapat mengetahui akan pentingnya program KB bagi Kesehatan ibu dan anak.

Dalam menentukan wilayah yang dijadikan lokasi Kampung KB, ada tiga kriteria dan beberapa sudah memenuhi, yaitu:

- 1) Kriteria utama yaitu Keluarga Pra Sejahtera yaitu keluarga yang tidak memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Berdasarkan data yang ada di

lapangan, pada tahun 2020 Keluarga Pra Sejahtera berjumlah 7 KK sedangkan Keluarga Sejahtera I berjumlah 352 KK. Sedangkan jumlah peserta KB Aktif pada tahun 2020 berjumlah 149 dan peserta KB Baru berjumlah 108 dari total Pasangan Usia Subur sebanyak 288.

- 2) Kriteria wilayah yang ada di Desa Boddie Kampung Lamasa terletak pada daerah pesisir.
- 3) Sedangkan dalam Kriteria khusus, memiliki beberapa aspek, dan dari kelima aspek yang terpenuhi salah satunya dengan memiliki program pembangunan terkait dari Kesehatan, ekonomi, Pendidikan, permukiman serta lingkungan yang sudah diterapkan dalam kampung KB Lamasa.

Maka dari itu, dalam pelaksanaan implementasi program Kampung KB di Lamasa Desa Boddie Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep, dimana ada empat faktor saling berinteraksi satu sama lain untuk membantu dalam proses implementasi kebijakan, maka pendekatan yang ideal yaitu dengan cara merefleksikan kompleksitas dengan keempat faktor yang menentukan keberhasilan dalam implementasi suatu kebijakan yaitu sebagai berikut.

a. Komunikasi

Komunikasi yang dilakukan yaitu proses yang dilakukan pemerintah dalam pelaksanaan suatu kebijakan yang ingin diterapkan ke masyarakat. variabel komunikasi ada beberapa indikator yang dapat mendukung keberhasilan implementasi, yaitu: transmisi (penyampaian), kejelasan dalam menyampaikan program tersebut serta konsistensi dari pelaksana kebijakan.

Berdasarkan dari indikator di atas, peneliti mewawancarai salah satu informan yang paham dalam penelitian ini yaitu Kepala Pengendali PLKB di Kecamatan mandalle yang Mengatakan:

“Di Kecamatan Mandalle ini dek pertama kali kita lakukan itu sosialisasi dan *alhamdulillah* kami sudah melakukan sosialisasi terkait Program Kampung KB, dan Kampung yang pertama kali dicanangkan yaitu berada di Lamasa, dan dalam pelaksanaan sosialisasi dan pendampingannya secara rutin kepada masyarakat yaitu kita berikan kepada wewenang nya yaitu PKB Desa Boddie serta PPKBD Kampung Lamasa terkait adanya program kampung KB yang dicanangkan di Kampung Lamasa karena di sini hanya Koordinator secara keseluruhan jadi tidak rutin untuk setiap saat melakukan pendampingan. Dan di desa lainnya juga beberapami sudah mulai aktif dalam mensosialisasikan program ini, cuman memang yang aktif itu dalam sosialisasi berada di Desa Boddie terkhusus di Kampung Lamasa” (Wawancara peneliti dengan MJ pada tanggal 25 Juni 2021).

★ Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Bapak MJ di atas, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi ini sudah dilakukan di beberapa Desa terkhususnya di Kampung Lamasa akan tetapi yang secara rutin melakukan sosialisasi dan tanggung jawab yaitu pihak yang ada di Desa terkhususnya para pelaksana di Desa Boddie Kampung Lamasa.

Hal itu pun di dukung oleh kepala PKB yang ada di Desa Boddie, mengatakan:

“Iya, saya sendiri selaku Kepala PKB di Boddie yang kita lakukan yaitu mensosialisasikan ke masyarakat yang memang akan diterapkan program Kampung KB ini dan kejelasan dari komunikasi kita ini terkait sosialisasi yang ada di Kampung Lamasa dengan PPKBD juga yang ada di Boddie untuk melakukan pendampingan terkait program ini kita disini sudah meminta bantuan dari pihak lain juga untuk membantu melakukan sosialisasi seperti aparat desa lainnya, Posyandu, bidan, kelompok keagamaan

juga maupun RT setempat disini dek, untuk sebagai media komunikasi terkait program Kampung KB ini” (Hasil wawancara peneliti dengan NH pada tanggal 30 Juni 2021).

Wawancara dengan informan ibu NH di atas menjelaskan bahwa, pelaksana kebijakan sudah melakukan komunikasi dengan cara bersosialisasi ke masyarakat dan pada saat sosialisasi program Kampung KB dengan masyarakat masih perlu ditingkatkan lagi sehingga pihak UPT yang ada bekerjasama dengan organisasi eksternal lainnya guna memperlancar dalam pelaksanaan sosialisasi tersebut.

Selanjutnya hasil wawancara dengan PPKBD Desa Boddie Kampung Lamasa yang mengatakan:

“Dalam komunikasi ini melalui sosialisasi mengenai Program Kampung KB serta mengenai apa-apa saja kegiatan yang akan dilakukan kita sudah konsisten kok dalam menyampaikannya karena disini kita tidak hanya untuk menggugurkan kewajiban saja tapi kita disini memang sudah merealisasikannya karena apabila ada bawahan saya semisal ada kegiatan mendata pasti harus terjun lapangan langsung tidak boleh tidak kalau ada bawahanku yang tidak turun maka saya akan beri sanksi yang tegas jadi disini sangat konsisten dalam mensosialisasikan Program Kampung KB dek supaya masyarakat tau manfaat dari program Kampung KB ini dek. Akan tetapi dek ada beberapa kendala juga waktu sosialisasi program ini salah satunya masyarakat awalnya tidak terlalu menganggap positif ini mengenai program Kampung KB” (Hasil wawancara peneliti dengan HW pada tanggal 05 Juli 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Selanjutnya hasil wawancara dengan ibu HW, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi Program Kampung KB ini sudah konsisten dijalankan dan turun langsung ke lapangan dan bukan hanya untuk menggugurkan kewajibannya saja tetapi

juga sosialisasi ditujukan agar memberi manfaat untuk masyarakat Ketika direalisasikan. Akan tetapi, walaupun pihak dari tim PPKBD sudah menjalankan tanggung jawabnya tetapi ketika mensosialisasikannya memiliki beberapa kendala salah satunya awalnya warga tidak menganggap positif mengenai program Kampung KB ini.

Program Kampung Keluarga Berencana mempunyai 11 (sebelas) program kerja yang dijalankan dalam Program Kampung Keluarga Berencana pada tahun 2020 yang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.5 Program Kerja Kampung Kb Desa Boddie

No	Program	Kegiatan	Tujuan	Sasaran
1.	Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Kesehatan pada lansia serta melakukan pengobatan. 2. Pelaksanaan posyandu balita. 3. Pelaksanaan posyandu lansia 4. Pelaksanaan senam lansia 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan semangat dan Kesehatan hidup lansia 2. Untuk melihat tumbuh kembang bayi dan balita 3. Mengetahui tingkat Kesehatan lansia setiap bulannya 4. Agar lansia menjadi semakin sehat dengan bergerak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lansia 2. Bayi dan balita 3. Lansia umur 45-70 tahun 4. Lansia
2.	Perencanaan sehat	<ol style="list-style-type: none"> 1. refreshing kader posyandu dan pengurus pokja 2. pengadaan buku SIP, meja kursi, dan papan data untuk posyandu 3. pembentukan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. meningkatkan kinerja kader posyandu dan pengurus pokja 2. melengkapi administrasi posyandu 3. meningkatkan pengetahuan dan kemampuan kader. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh kader posyandu 2. Posyandu 3. Kader KIA

		dan pelatihan kader dalam rangka peningkatan kapasitas kader yang kompetensi		
3.	Kelestarian lingkungan hidup	Penyuluhan tentang pemanfaatan pekarangan dan rumah sehat	Terwujudnya keluarga sehat, sejahtera dalam lingkungan rumah	Seluruh masyarakat dan pengurus PKK Desa
4.	Program organisasi	Pembentukan majelis ta'lim Desa	Membina dan mengembangkan hubungan yang satu antara manusia dengan Allah	Masyarakat Desa Boddie
5.	Pedoman dan penghayatan pancasila	Pembinaan Kelompok <ul style="list-style-type: none"> • PKBN • PKDRT • Pola Asuh 	Meningkatkan tata cara mendidik anak	<ul style="list-style-type: none"> • TP. PKK Desa • Kader • Anggota
6.	Gotong Royong	Pembinaan kelompok rukun kematian, rukun keagamaan, kelompok kerja bakti	<ul style="list-style-type: none"> • Gotong royong • Jumat bersih 	Masyarakat desa boddie
7.	Kegiatan keagamaan	Peringatan hari besar islam dan STQ	Untuk meningkatkan tali persaudaraan antar umat beragama islam	Masyarakat Desa Boddie
8.	Pendidikan dan Keterampilan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengadakan pembinaan kelompok bermain PAUD Melati Dusun Boddie 2. Pembinaan keterampilan 3. Mengadakan pertemuan pada kelompok BKB di Desa Boddie 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan 2. Agar pengurus mengetahui tugasnya 3. Meningkatkan pengetahuan kelompok untuk masa depan sejahtera 4. Meningkatkan kecerdasan dan kreativitas anak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siswa PAUD 2. TP. PKK Desa Boddie 3. PLP BKB 4. Guru Paud 5. Siswa Paud

		4. Mengadakan pelatihan membuat ARC untuk PAUD 5. Pemberian makanan tambahan untuk PAUD	5. Untuk memperbaiki keadaan gizi pada anak.	
9.	Pangan	Penyuluhan tentang makanan bergizi, berimbang dan beragam	Untuk mengetahui manfaat makanan bergizi, berimbang dan beragam	Ibu rumah tangga
10.	Sandang	Pembimbingan pengrajin sandang	Meningkatkan pengelolaan pengrajin sandang	Kelompok pengrajin masyarakat
11.	Perumahan dan tata laksana rumah tangga	Penyuluhan tentang rumah sehat	Untuk mengetahui/melaksanakan kriteria rumah sehat	masyarakat

Sumber: Data Desa Boddie

Selanjutnya hasil wawancara dengan salah satu warga di Kampung

Lamasa mengatakan:

"Iya pernah nak melakukan sosialisasi disini, dan memang ada stafnya datang ketika melakukan sosialisasi. Walaupun awalnya dikira bilang sosialisasi apa tapi lama kelamaan bisa diterima juga karena demi kebaikan ji juga ini program tapi waktu awal dibentuknya memang jarang stafnya sosialisasi inipi lagi paling aktifmi itu pengurusnya datang baru juga tahun 2019 aktif sekali menjalankan kegiatannya disini" (hasil wawancara peneliti dengan MS pada tanggal 05 Juli 2021).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, pihak dari PPKBD sudah melakukan sosialisasi walaupun awal-awal kegiatannya belum terlalu lancar.

Lebih lanjut lagi, wawancara dengan informan berikutnya yaitu salah satu warga, mengatakan:

“Sudahji melakukan sosialisasi disini dan waktu awal memang kami tidak terlalu menanggapi akan tetapi lama kelamaan sudah mulaimi kuliati para warga lainnya disini ikut dalam program-program yang na laksanakan disini dan setiap ada kegiatan alhamdulillah warga disini ikutji juga ketika ada panggilan rapat juga” (hasil wawancara peneliti dengan MN pada tanggal 07 Juli 2021).

Berdasarkan hasil wawancara di atas disimpulkan bahwa memang pihak dari staf UPT sudah melakukan sosialisasi dan seiring berjalannya waktu masyarakat sudah mulai antusias mengikuti kegiatan-kegiatan dari program tersebut

b. Sumber Daya

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu unit kebijakan yang mendukung pelaksanaan kebijakan secara efektif. Adapun SDM yang dimaksud dalam penulisan ini adalah ketersediaan staf atau pelaksana dari yang menangani program kampung Keluarga Berencana (KB). Kemudian adanya fasilitas (sarana prasarana) yang disediakan oleh pelaksana kebijakan di wilayah kampung Lamasa Desa Boddie guna menjunjung proses implementasi kebijakan terkait program Kampung Keluarga Berencana (KB).

Berdasarkan dari indikator di atas, peneliti mewawancari Kepala Pengendali PLKB Kecamatan Mandalle, Mengatakan:

“Dalam menjalankan program Kampung KB kami berusaha meningkatkan kualitas staf yang ada disini dek supaya tugasnya yang diberikan berjalan dengan baik dan sesuai bidang dan kemampuannya masing-masing juga dan kami mengangkat ketua-ketua pendamping setiap desa walaupun SDM disini masih kurang untuk wilayah Mandalle disini dek tapi kita tetap berusaha

meningkatkan kualitas” (Wawancara peneliti dengan MJ pada tanggal 25 Juni 2021).

Berdasarkan hasil wawancara di atas berkaitan dengan Sumberdaya yang merupakan indikator peneliti dapat dipahami bahwa pihak UPT berusaha meningkatkan kualitas stafnya dan membagi masing-masing pelaksana setiap desa guna program tersebut berjalan dengan baik dan sesuai dengan kemampuannya masing-masing walaupun SDM yang ada masih kurang.

Adapun tambahan wawancara Kepala PKB Desa Boddie, mengatakan:

“Mengenai sosialisasi ke masyarakat kami di kecamatan sudah serahkan ke PPKBD Desa Boddie supaya program ini lebih mudah untuk disosialisasikan dan tepat sasaran ke masyarakat. Mengenai sarana prasarana nya alhamdulillah disini sudah maksimal karena sudah di fasilitasi contohnya sekretariat di kecamatan maupun yang ada di desa Boddie akan tetapi sebenarnya dek dari anggaran yang ada masih kurang dek, itupun kalau ada anggaran juga dari dinas yang ada di Pangkep dan itupun belum pasti juga kapan cairnya”. (Hasil wawancara peneliti dengan NH pada tanggal 30 Juni 2021).

Berdasarkan hasil wawancara informan di atas dapat dipahami bahwa dalam peningkatan kualitas sosialisasi Kepala PKB menyerahkan ke pihak PPKBD di Desa Boddie supaya mendapatkan hasil yang tepat sasaran, dan mengenai sarana prasarana nya yang mendukung pelaksanaan Program Kampung KB sudah terpenuhi dan terkait Sumber Daya Anggaran masih kurang ketika ingin melaksanakan program kerja.

Selanjutnya, wawancara informan dengan Kepala PPKBD Desa Boddie yang mengatakan:

“Disini dek ada beberapa kegiatan atau program kerja dari penerapan Kampung KB itu salah satunya di bidang keagamaan. Karena kita bersosialisasi juga terkait Program Kampung KB ini dengan mendekati ke masyarakat melalui bidang keagamaan juga adapun kegiatannya disini yaitu mengaji atau semacam pengajian dan dalam pelaksanaan suatu kebijakan tersebut pasti perlu sumberdaya yang berperan penting dan yang membantu kami disini pelaksanaannya yaitu imam masjid dikampung ini sendiri kemudian alhamdulillah juga dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang mendukung. Kemudian juga dek SDM yang ada disini masih bisa dibilang kurang karena” (Hasil wawancara peneliti dengan HW pada tanggal 05 Juli 2021).

Berdasarkan wawancara di atas yang sesuai dengan indikator Sumberdaya, dapat dipahami bahwa untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat perlu pendekatan yang lebih dekat salah satunya melakukan kegiatan di bidang keagamaan yaitu dengan mengadakan pengajian setiap kampung yang ada di Desa Boddie dan juga sumber daya manusia juga berperan penting dalam melaksanakan kebijakan tersebut apalagi dengan sarana dan prasarana yang mendukung kebijakan tersebut.

Adapun wawancara peneliti dengan informan salah satu warga Kampung lamasa, yang mengatakan:

“Disini nak dalam pelaksanaan kebijakannya ada beberapa pihak luar yang terlibat juga seperti Ketika disini melakukan posyandu ada beberapa dari puskesmas yang membantu juga dari desa juga ada cuman itumi sekarang karena covid ki juga jadi jarangmi lagi diadakan” (Hasil Wawancara HJ pada tanggal 05 Juli 2021).

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa dalam melakukan sosialisasi perlu adanya Sumberdaya manusia yang cukup serta adanya Kerjasama dengan pihak luar/organisasi eksternal.

“Masyarakat disini sadar akan pentingnya Program KB karena disini sisa beberapa rumah dengan Pasangan Usia Subur (PUS), kami disini juga aktif ji mengikuti kegiatannya walaupun ada beberapa yang tidak ikut tapi lumayan mi juga yang ikut berpartisipasi” (Hasil wawancara MS pada tanggal 07 Juli 2021).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan MS, dapat disimpulkan bahwa masyarakat sudah sadar akan pentingnya Program KB walaupun masih ada beberapa masyarakat yang kurang berpartisipasi.

c. Disposisi

Disposisi atau sikap dan komitmen dari pelaksana kebijakan, terkhusus terhadap sikap implementor. Disposisi tersebut terkait bagaimana pembagian tugas dalam pengimplementasian kebijakan tersebut.

★ Dari indikator di atas peneliti mewawancari Kepala PLKB Kecamatan Mandalle mengatakan:

“Dalam kegiatan yang dilakukan di Kampung Lamasa itu dilakukan langsung oleh staff yang ada di desa dek, tetapi kami disini tetap melakukan pengawasan jika sedang melaksanakan kegiatan maupun ketika ada kendala yang terjadi juga sehingga cepatti kita tangani juga” (Hasil wawancara peneliti dengan MJ pada tanggal 25 Juni 2021).

Berdasarkan wawancara informan dengan bapak MJ di atas yang berkaitan dengan indikator Disposisi atau Sikap Pelaksana dapat dipahami dimana pihak Kepala PLKB mendisposisikan kegiatan yang ada di Program kampung KB kepada staff yang ada di Desa Boddie tetapi tetap dengan sesuai aturan dan Ketika ada kendala dapat terselesaikan dengan cepat.

Adapun wawancara dengan Kepala PKB Desa Boddie yang mengatakan:

“Ketika ada masalah yang terjadi dilapangan waktu mensosialisasikan kegiatan apa saja yang ingin dilakukan, ya kami selaluji berkoordinasi terhadap kepala PPKBD untuk membantu mengkoordinasikan seluruh staff atau kepala bidang masing-masing jika memiliki masalah dalam melaksanakan kegiatannya” Hasil wawancara dengan NH pada tanggal 30 Juni 2021).

Berdasarkan wawancara peneliti dengan informan ibu NH terkait dengan indikator Disposisi dipahami bahwa pihak Kepala PKB dengan bawahannya ketika terjadi masalah disposisi dari kegiatan program Kampung KB pasti tepat teratasi karena kepala UPT yang ada di Kecamatan selalu berkoordinasi dengan staff yang ada di Desa sehingga masalah yang terjadi di lapangan dapat diselesaikan.

Selanjutnya, hasil wawancara peneliti dengan informan dengan Kepala PPKBD Desa Boddie, mengatakan:

“Disposisi yang diberikan kepada staff masing-masing bidang dari UPT di kecamatan sudah cukup baik sehingga sosialisasi mengenai Program Kampung KB sudah bisa diterima di masyarakat dan semoga masyarakat bisa merasakan manfaat dan pentingnya tentang Program KB ini. Kemudian saya sebagai kepala juga disini di Kampung Lamasa terkhususnya, pasti ingin mensukseskan kebijakan ini maka dari itu pastinya staff sangat berperan dalam pelaksanaan program kerja yang telah ditetapkan serta saya selalu mengingatkan tentang tugas dan tanggung jawabnya masing-masing” (Hasil wawancara peneliti dengan HW tanggal 05 Juli 2021).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di pahami bahwa disposisi yang telah diberikan untuk staff bidang masing-masing sudah

cukup baik sehingga sosialisasi Program kampung KB walaupun masih perlu ditingkatkan lagi dan semoga masyarakat dapat memanfaatkan sosialisasi yang telah dilakukan. Kemudian staf/pegawai sangat berperan penting dalam melaksanakan program yang diterapkan serta memiliki tanggung jawab dalam tugasnya masing-masing yang telah diberikan.

Selanjutnya, hasil wawancara dengan informan salah satu warga di Desa Boddie Kampung Lamasa, Mengatakan:

“Disini nak sesuai ji dengan tugasnya semua karena dari UPT di kecamatan dalam melakukan keputusan tepatji semua, Ketika ada perintah nya kuliat dari atasannya selam dilakukan oleh staff yang ada di boddie sesuaiji” (Hasil wawancara dengan HI pada tanggal 05 Juli 2021).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Kepala UPT setempat sudah baik dilakukan dalam melaksanakan tujuan program yang diberikan kepada masyarakat.

Kemudian hasil wawancara dari salah satu warga Desa Boddie Kampung Lamasa, yang mengatakan:

“Saat petugas melakukan sosialisasi juga disini nak kita dapat pahami semua, masyarakat juga disini jadi mengerti tentang pentingnya program KB kemudian pembagian tugas yang dilakukan oleh atasannya selalu tepat dan tegas ki juga kepalanya” (Hasil Wawancara peneliti dengan informan MS pada tanggal 07 Juli 2021).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa memang para pelaksana Program tersebut memiliki pemahaman serta pengetahuan yang luas karena dapat menjelaskan serta memberi informasi

kepada masyarakat secara jelas sehingga masyarakat jadi paham akan pentingnya dari penerapan suatu kebijakan yang dilaksanakan.

d. Struktur Birokrasi

Dalam melaksanakan kebijakan yang ada pasti tidak terlepas dari adanya struktur organisasi, pembagian kekuasaan, serta hubungan antar unit-unit organisasi yang ada terjalin secara terus menerus yang memiliki hubungan baik potensial maupun nyata dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

Berdasarkan indikator di atas peneliti kemudian mewawancarai Kepala PLKB Kecamatan Mandalle, yang Mengatakan

“Dalam kebijakan Program Kampung KB yang sedang dijalankan untuk masyarakat pasti tidak terlepas dengan adanya struktur organisasi. Disini di kecamatan kami terbagi setiap desa mempunyai kepala PKB yang meng koordinir pelaksanaan sosialisasi program yang dijalankan oleh Kepala PPKBD kepada masyarakat”. (Hasil wawancara MJ pada tanggal 25 Juni 2021).

Berdasarkan wawancara peneliti dengan informan MJ terkait dengan Struktur birokrasi dapat di pahami bahwa Kebijakan yang sedang dijalankan untuk masyarakat itu tidak terlepas dengan adanya struktur yang memang bertugas untuk menangani program Kampung KB dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Adapun hasil wawancara Kepala PKB Desa Boddie, yang mengatakan:

“Iya selaluji berkomunikasi secara intens dengan Staff PPKBD desa Boddie terkait program apa yang akan dijalankan, kemudian cara mengatasi kendala yang ada juga karena memang komunikasi itu

penting untuk kelancaran kebijakan tersebut” (Hasil wawancara peneliti pada tanggal 30 juni 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu NH dapat disimpulkan bahwa dalam suatu komunikasi dengan seluruh staff yang ada di struktur terkait dengan program Kampung KB, kami terus melakukan komunikasi yang intens pada seluruh para pembantu pelaksana program kampung KB ini agar kita semua satu visi serta sesuai dengan yang diharapkan.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Kepala PPKBD, mengatakan:

“Kerjasama kami disini dengan pihak UPT kecamatan maupun Kabupaten dan masyarakat juga dalam struktur birokrasi alhamdulillah cukup baik. Ketika melakukan penyuluhan ataupun sosialisasi mengenai pentingnya program tersebut bahwa bahayanya usia tua untuk melahirkan serta ketika hamil ataupun melahirkan dengan jarak yang dekat itu berbahaya bagi seorang ibu dan dengan adanya kampung KB , kita dapat mengawasi warga yang terkena stunting, memberikan keterampilan juga dengan pemanfaatan sumber penghasilan yang ada dikampung ini” (Hasil wawancara peneliti dengan informan HW pada tanggal 05 Juli 2021)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa melalui program Kampung KB masyarakat menjadi tahu akan pentingnya melakukan KB karena untuk mencegah bahaya yang dialami seorang ibu kedepannya. Ketika melahirkan terlalu dini ataupun sudah berumur, dengan adanya kampung KB juga kita bisa membantu masyarakat untuk pemanfaatan sumber daya alam yang ada dengan melakukan keterampilan-keterampilan guna untuk menjadi sumber penghasilan.

Adapun hasil wawancara dengan salah satu warga yang ada di Kampung Lamasa Desa Boddie, mengatakan:

“Kegiatan yang diterapkan oleh para birokrasi dengan melakukan sosialisasi kegiatan yang ada dalam program kampung KB yang sebelumnya disini nak terjadi pertumbuhan penduduk yang banyak, tapi setelah adanya program ini masyarakat bisa bekerja sama serta mendukung ini program kampung kb juga karena banyakmi yang melakukan suntik kb juga” (Hasil wawancara HJ pada tanggal 05 Juli 2021).

Berdasarkan wawancara peneliti dengan informan HJ di atas dapat dipahami bahwa kegiatan yang dilakukan oleh para birokrat dengan melakukan sosialisasi Kegiatan dari Program Kampung KB dimana yang sebelumnya pertumbuhan penduduk terjadi, setelah adanya program itu masyarakat sudah bisa mengerti dan paham pentingnya melakukan suntik KB guna untuk menekan kepadatan penduduk terjadi.

Setelah wawancara di atas, adapun tanggapan salah satu warga lainnya mengenai indikator Struktur Birokrasi, mengatakan:

“Disini nak para petugas melakukan sosialisasi mengenai program kerja yang ingin dilaksanakan terlebih dahulu salah satunya juga memberi informasi pentingnya melakukan KB karena ketika angka kelahiran bertambah juga serta ketika terlalu sering seseorang melahirkan akan berbahaya bagi seorang ibu, sebelumnya disini juga angka kelahiran bertambah tapi sekarang kuliati disini kurang-kurangmi yang hamil juga, mulai stabil kuliati disini setelah adanya ini program bukan hanya itu saja kegiatan keterampilan lainnya juga sering dilaksanakan juga jadi kita disini bisa memanfaatkan bahan yang ada untuk diolah” (Hasil wawancara dengan MS pada tanggal 07 Juli 2021).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa kegiatan para pelaksana kebijakan dengan bersosialisasi mengenai kegiatan dari program Kampung KB yang sebelumnya terjadi penambahan angka kelahiran tapi setelah diadakan program kampung KB

tersebut masyarakat bisa bekerjasama dengan baik dan mendukung program ini karena sudah ikut berpartisipasi untuk menekan angka kelahiran dan sudah memanfaatkan sumber daya alam untuk diolah sebagai sumber pendapatan bagi warga setempat.

C. Pembahasan

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi program Kampung KB di Kampung Lamasa Desa Boddie Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep, adapun pembahasan di bawah ini keterkaitan antara hasil wawancara dan teori peneliti yang menggunakan empat faktor yang saling berinteraksi satu sama lain untuk membantu dalam proses implementasi kebijakan yang terfokus kepada komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi

Komunikasi bisa dikatakan sebagai suatu cara dalam mensosialisasikan program yang akan dilaksanakan ke masyarakat sehingga masyarakat mengetahui tentang adanya program kampung KB, agar masyarakat bisa berpartisipasi dalam pelaksanaan program kampung KB.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di atas dari beberapa informan dimana pihak UPT setempat dalam menyampaikan program yaitu melakukan sosialisasi bersama dengan pihak Desa maupun lintas sektor lainnya. Dalam mensosialisasikan program Kampung KB sudah cukup baik karena pihak implementor sangat konsisten dalam menyampaikan informasi yang ada yang tidak hanya menggugurkan

keajiban saja tetapi berguna untuk masyarakat untuk direalisasikan. Dalam pelaksanaan pelatihan terkait program kerja yang ingin dilaksanakan sebenarnya sudah cukup baik, tetapi untuk saat sekarang ini program kerja yang akan dijalankan menjadi terkendala hal itu dikarenakan karena pandemic sehingga kurangnya tim penyuluh untuk melakukan pelatihan.

Dapat dijelaskan dari pembahasan di atas yang menunjukkan bahwa teori Menurut George C Edwards III mengenai komunikasi sudah sesuai karena para pelaksana sudah melakukan komunikasi dengan baik yaitu dengan menyampaikan informasi tersebut melalui sosialisasi kepada masyarakat, serta kejelasan informasi yang diberikan sudah baik karena para pelaksana bekerjasama dengan organisasi eksternal lainnya sehingga dapat dikatakan efektif dalam proses komunikasi kepada masyarakat.

2. Sumber Daya

Merupakan suatu kebijakan yang penting dalam pelaksanaan implementasi, karena apabila implementor kekurangan sumber daya maka implementasi tidak dapat berjalan dengan efektif. Maka dari itu, mengenai sumber daya, program kampung KB ini tidak terlaksana dengan baik apabila masih kekurangan salah satu dari sumber daya yang ada. Sebaiknya kebijakan program kampung KB ini akan berjalan baik apabila ketiganya terpenuhi yaitu SDM, Sumber Daya (S)ilitas dan Sumber Daya Anggaran.

Adapun kesimpulan secara keseluruhan berdasarkan informan di atas dengan indikator Sumberdaya yaitu mengenai Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada sebenarnya belum bisa dikatakan cukup tetapi pihak UPT berusaha untuk meningkatkan kualitas sosialisasi mengenai program kampung KB. Kepala PKB di kecamatan mandalle juga menyerahkan kepada Kepala PPKBD guna untuk melaksanakan kegiatan atau program kerja yang ada. Kegiatan yang utama dilaksanakan demi mendekatkan ke masyarakat yaitu melalui bidang keagamaan dengan mengadakan pengajian setiap Kampung yang ada di Desa Boddie. Sumberdaya manusia sangat berperan penting untuk menjalankan kebijakan yang ditetapkan. Para implementor juga sudah memiliki kemauan yang kuat dalam melaksanakan program tersebut. Walaupun masyarakat Sebagian besar sudah ikut berpartisipasi tetapi masih ada beberapa masyarakat yang kurang sadar akan pentingnya program Kampung KB tersebut. Pelaksana program selalu mengingatkan kepada masyarakat akan pentingnya keberhasilan dalam program Kampung KB ini, dimana sejak awal sudah melakukan kerjasama dengan organisasi eksternal guna keberhasilan kebijakan tersebut. Kemudian dalam sarana dan prasarana nya sudah cukup mendukung dalam pengimplementasian program tersebut. Kemudian dalam Sumber Daya Anggaran masih kurang karena ketika melaksanakan program kerja hanya menggunakan dana dari Dinas terkait dan alokasi anggaran dari desa yang belum pasti.

Dari pembahasan di atas dapat dijelaskan bahwa dari teori George C Edwards III dengan indikator Sumber daya belum dikatakan efektif karena masih kurangnya Sumber Daya Manusia. Tetapi dari Sumber Daya Fasilitas sudah sangat mendukung dalam pengimplementasian program karena adanya sekretariat yang dinamakan rumah dataku serta adanya penunjang fasilitas ketika melakukan pelatihan kepada masyarakat sedangkan dari Sumber Daya Anggaran yang masih kurang menunjang dalam pelaksanaan program Kampung KB.

3. Disposisi

Disposisi adalah faktor yang penting dalam implementasi kebijakan yang efektif. Apabila para pelaksana memiliki sikap positif serta melakukan pembagian tugas dengan baik maka implementasi kebijakan akan terlaksana dengan efektif. Jika sikap dari para pelaksana berbeda maka implementasi tersebut akan terjadi banyak masalah.

Berdasarkan wawancara dapat disimpulkan bahwa Pihak UPT baik yang ada di Kecamatan ataupun di Desa dalam mendisposisikan suatu kegiatan dari Program Kampung KB kepada seluruh Staff lainnya dan tidak terlepas adanya aturan serta ketika ada kendala tetapi dapat terselesaikan dengan baik. Apalagi dalam melakukan sosialisasi, ketika terjadi permasalahan terkait Disposisi atau Sikap dari Pelaksana kegiatan Program Kampung KB pasti dapat dikendalikan dengan cepat karena pihak kepala UPT selalu berkoordinasi dengan staff yang bersangkutan ketika adanya masalah. Walaupun beberapa masalah dapat diatasi tetapi

diharapkan masyarakat bisa memanfaatkan sosialisasi yang telah diberikan serta dapat merealisasikannya. Kemudian para pelaksana Program tersebut memiliki pemahaman serta pengetahuan yang luas karena dapat menjelaskan serta memberi informasi kepada masyarakat secara jelas sehingga masyarakat jadi paham akan pentingnya dari penerapan suatu kebijakan yang dilaksanakan.

Dari pembahasan di atas dapat dijelaskan bahwa teori dari George C. Edwards dengan indikator Disposisi dapat dikatakan efektif karena para pelaksana dalam pembagian tugas sudah baik dan mengikuti aturan yang ada. Kemudian sikap pelaksana dalam hal ini sudah baik karena dengan adanya masalah pasti dapat dikendalikan dengan cara melakukan koordinasi langsung. Kemudian pemahaman serta pengetahuan yang luas dimiliki pelaksana saat memberikan informasi sangat jelas karena membuat masyarakat menjadi paham terkait informasi yang disampaikan.

4. Struktur Birokrasi

Merupakan suatu struktur organisasi yang memiliki tugas dalam pengimplementasian program yang akan dilaksanakan yaitu program kampung KB yang dapat tercapai sesuai yang diharapkan. Terkait untuk memfokuskan dalam pencapaian tujuan dimana untuk mengetahui pelaksanaan implementasi program kampung KB di Kampung Lamasa Desa Boddie Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep. Adapun struktur tim pelaksana dalam pelaksanaan program Kampung Keluarga Berencana di Desa Boddie Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep sebagai berikut:



Gambar 4.4 Struktur Organisasi Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD)

Adapun hasil wawancara mengenai struktur birokrasi dan dapat disimpulkan bahwa Dalam kegiatan dan program Kampung KB yang sedang dijalankan masyarakat tidak terlepas dari struktur yang telah diberikan tugas dalam menjalankan kegiatan dari program Kampung KB dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan tujuan yang ada. Dengan adanya program Kampung KB masyarakat langsung tahu informasi yang diberikan kepada tim penyuluh KB. Kegiatan yang dilakukan oleh birokrasi yang bersosialisasi mengenai program Kampung KB dimana sebelumnya masih terjadinya angka kelahiran yang tinggi serta kepadatan penduduk terjadi, tetapi setelah adanya program KB ini masyarakat dapat bekerja sama dan berpartisipasi dengan melakukan KB guna menekan kepadatan penduduk.

Dapat dilihat dari pembahasan di atas bahwa pelaksanaan program tersebut tidak terlepas dengan struktur yang telah diberikan tugas dalam menjalankan kegiatan tersebut, sehingga sudah sesuai dengan teori dari

George C. Edwards karena sudah diatur sesuai penempatannya setiap bidang-bidang sehingga dalam melaksanakan tugasnya sudah sesuai dengan perannya masing-masing.

Dalam pengimplementasian program Kampung KB yang ada di Lamasa memiliki faktor pendukung yaitu adanya respon baik dari masyarakat maupun pemerintah, tersedianya sarana dan prasarana yang ada, terlaksananya sosialisasi dengan baik.

Dalam pelaksanaan program Kampung KB, ada beberapa kendala atau penghambat yaitu masih kurangnya dana/anggaran yang ada, serta terbatasnya SDM terkait yang melakukan penyuluhan ketika melakukan program kerja.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Desa Boddie Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep secara umum sudah cukup baik dan sudah terlaksana dengan optimal.

Dari hasil Komunikasi yang menunjukkan bahwa Mengenai program kampung KB, pelaksana sudah melakukan Komunikasi yaitu dengan cara melakukan sosialisasi serta pendampingan yang sudah diberikan untuk masyarakat dan sudah terlaksana dengan efektif. Kemudian dari adanya sosialisasi tersebut masyarakat sudah bisa menerima dan mengerti informasi dari pihak pembuat kebijakan tersebut.

Dalam hal Sumber Daya, dimana dalam Sumber Daya Fasilitas sudah bisa dianggap efektif dengan adanya fasilitas ketika dalam menjalankan program yang dijalankan. Sedangkan Sumber Daya Manusia yang dimiliki masih belum tercukupi, apalagi terkait untuk memberikan penyuluhan ataupun pendampingan mengenai program Kampung KB sehingga dalam hal SDM masih belum efektif begitupun dari Sumber Daya Anggaran yang masih belum menunjang dalam pelaksanaan program kerja yang ada.

Dari hasil Disposisi, pemerintah maupun masyarakat sangat mendukung adanya program kampung KB. Pihak Implementor melakukan pembagian tugas kepada staff yang ada tetapi tidak terlepas adanya aturan serta ketika ada kendala tetapi dapat terselesaikan dengan baik. pihak kepala UPT selalu berkoordinasi dengan staff yang bersangkutan ketika terjadi masalah. Kemudian terkait pengetahuan dan pemahaman implementor sudah cukup optimal, karena masyarakat mengerti dan paham terkait informasi yang diberikan sehingga pelaksanaan program kerja dapat berjalan dengan baik sehingga dalam pembagian tugas yang dilakukan sudah efektif.

Dari hasil Struktur Birokrasi, pelaksanaan program tersebut tidak terlepas dengan struktur yang telah diberikan tugas dalam menjalankan kegiatan tersebut sehingga dapat berjalan baik dan efektif karena sudah diatur sesuai penempatannya setiap bidang-bidang sehingga sudah terkoordinasi untuk membuat kerja sama yang baik.

B. Saran

Melalui penelitian ini, maka penulis mempunyai beberapa saran dan semoga dapat bermanfaat serta menjadi evaluasi untuk kedepannya, yaitu:

1. Komunikasi yang sudah baik dan maksimal harus tetap dipertahankan dan sebisa mungkin untuk terus dikembangkan metode atau teknik komunikasi yang sekiranya akan lebih meningkatkan hasil dari pengimplementasian program Kampung KB.

2. Secara kuantitas, Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh pihak implementor perlu ditambah. Jika perlu, sebaiknya dilakukan pengkaderan untuk mendapatkan tambahan personil yang berkualitas untuk menunjang proses implementasi program di lapangan serta melakukan perumusan anggaran agar pelaksanaan program kerja memiliki anggaran/dana yang jelas.
3. Terkait Sikap Pelaksana saat melakukan sosialisasi harus dipertahankan supaya masyarakat bisa selalu mengerti dan paham tentang informasi yang disampaikan, sehingga pelaksanaan program kerja apapun nantinya dapat terlaksana dengan baik.
4. Untuk pihak birokrasi terkait, agar lebih menunjukkan apresiasinya kepada tim implementor di lapangan baik berupa dana insentif atau penambahan fasilitas lapangan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah, A. Y., & Rusfiana, Y. (2016). *Teori & Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Cv. Alfabeta.
- Anggraeni, N., Afifuddin, & Suyeno. (2020). Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat (Studi Kasus Desa Sumberkarang Kabupaten Mojokerto). *Jurnal Respon Publik*, 14(1), 32–41.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Hasil Sensus Penduduk 2020*. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html>
- BKKBN. (2019a). *Kampung KB*. <https://kampungkbbkkbn.go.id/profile/12123>
- BKKBN. (2019b). *Kampung KB Sebagai Wahana Pemberdayaan Masyarakat*. <https://kampungkbbkkbn.go.id/about>
- Dunn, W. N. (2012). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hamdi, M. (2014). *Kebijakan Publik (Proses, Analisis, Dan Partisipasi)* (R. Sikumbang (ed.); Kedua). Bogor: Ghalia Indonesia.
- HM, R., & Indrawadi, J. (2019). Implementasi Program Kampung KB dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Gunung Pangilun Kecamatan Padang Utara Kota Padang. *Journal of Civic Education*, 2(4), 295–301. <https://doi.org/10.24036/jce.v2i4.233>
- Infopublik.id. (2020). *Pit Kadis DPPKB Pangkep dr Herlina: Prioritaskan Tata Kampung KB yang Lebih Baik*. <http://infopublik.id/kategori/nusantara/500544/pit-kadis-dppkb-pangkep-dr-herlina-prioritaskan-tata-kampung-kb-yang-lebih-baik?video=>
- Lettiyani, E., Isabella, & Kencana, N. (2020). Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Desa Sribunga Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKUT). 5(3), 1–9.
- Liana, D. A., & Santoso, S. (2010). Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Pasar Di Kabupaten Blora (Studi Kasus Pasar Blora Kota). 9(1), 76–99.
- Masriani. (2017). Implementasi Kebijakan Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Anak-Anak Pengemis Di Kecamatan Mandau. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau*, 4(2), 1–

13.

- Muliawaty, L. (2019). Strategi Implementasi Kebijakan Tentang Program Kampung Keluarga Berencana Menuju Keluarga Sejahtera Di Kabupaten Cirebon. *Decision: Jurnal Administrasi Publik*, 1(2), 82. <https://doi.org/10.23969/decision.v1i2.1878>
- Parawangi, Anwar. (2011). *Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah Di Kabupaten Bone)*. Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Pasolong, H. (2013). *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Cv. Alfabeta.
- Peraturan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Peringatan Dini Pengendalian Penduduk
- Ratmawati, N. N. (2019). *Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (Dp3appkb) Untuk Meningkatkan Keterlibatan Masyarakat Dalam Program Keluarga Berencana Di Kabupaten Karanganyar*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial, Politik dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Semarang, Semarang.
- Subianto, A. (2020). *Kebijakan Publik: Tinjauan Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi*. Surabaya: Brilliant.
- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Cv. Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Cv. Alfabeta.
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI).
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

L

A

M

P

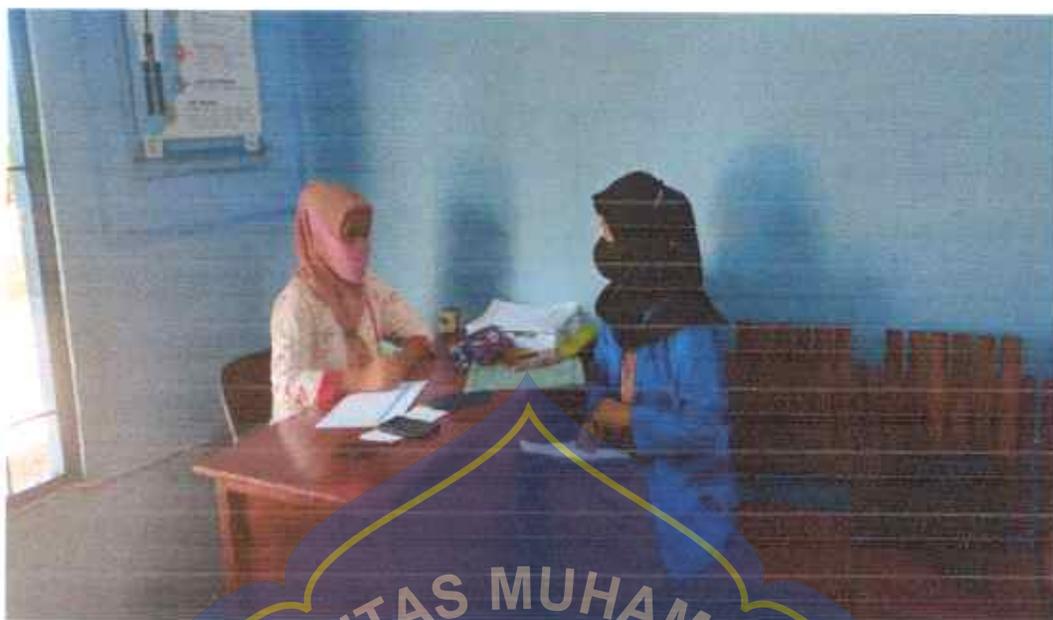
I

R

A

N





**Wawancara dengan Ibu Nurhatijah (Kepala Pelaksana Pendayagunaan
Tenaga Penyuluh KB/PSEB Desa Boddie)**



**Wawancara dengan Bapak Muh. Jufri, S.Sos (Kepala Pengendali PLKB
Kecamatan Mandalle)**